

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
PERIODE TAHUN 2025 AUDITED**

**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH (567392)
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN (09)
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)**

**Untuk Periode Tahun 2025 Audited
Yang Berakhir 31 Desember 2025**



Jl. P. Nyak Makam No. 27 Kota Baru - Banda Aceh

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BRMP Aceh adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BRMP Aceh mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara pada BRMP Aceh. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banda Aceh, 5 Mei 2026
Kepala BRMP Aceh



Firdaus, SP, M.Si
NIP. 197108052006041002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
II. NERACA	4
III. LAPORAN OPERASIONAL	5
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7
A. PENJELASAN UMUM.....	7
A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN PERTANIAN	7
A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	8
A.3. BASIS AKUNTANSI.....	13
A.4. DASAR PENGUKURAN	13
A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	14
B. PENJELASAN ATAS POS-POS REALISASI ANGGARAN	41
B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	41
B.2. BELANJA	45
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	56
C.1. ASET.....	56
C.2. KEWAJIBAN	85
C.3. EKUITAS.....	89
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	90
D.1. KEGIATAN OPERASIONAL	90
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ...	109
E.1. EKUITAS AWAL	109
E.2. SURPLUS/ DEFISIT – LO	109
E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR.....	109
E.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	117

E.5. KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS	120
E.6. EKUITAS AKHIR	120
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	121
F.1. PEMBENTUKAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN.....	121
F.2. PENGUNGKAPAN CAPAIAN RINCIAN OUTPUT PER FUNGSI APBN DAN PRIORITAS NASIONAL 2025.....	121
F.3. CATATAN DALAM MONSAKTI	126



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BRMP Aceh yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Periode Tahun 2025 Audited yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banda Aceh, 5 Mei 2026

Kepala BRMP Aceh

Firdaus, SP, M.Si

NIP. 197108052006041002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BRMP Aceh periode Tahun 2025 AUDITED yang berakhir pada 31 Desember 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp388.429.713,00 atau mencapai 119,22% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp325.800.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp9.574.738.591,00 atau mencapai 97,87% dari alokasi anggaran sebesar Rp9.782.771.000,00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas periode Tahun 2025 Audited yang berakhir pada 31 Desember 2025. Nilai Aset Tahun 2025 Audited dicatat dan disajikan sebesar Rp166.637.283.544,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp922.203.929,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp165.577.409.908,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp148.412.574,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp166.637.283.544,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode Tahun 2025 AUDITED adalah sebesar Rp311.069.544,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp10.996.570.163,00 sehingga terdapat Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(10.685.500.619,00). Surplus Kegiatan Non Operasional dan

Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp996.857.669,0 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(9.687.142.950,00).

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp167.203.317.616,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(9.687.142.950,00) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp(65.200.000,00) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp9.186.308.878,00 sehingga Ekuitas entitas pada Periode Tahun 2025 Audited adalah senilai Rp166.637.283.544,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan Periode Tahun 2025 Audited berakhir pada 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 Audited disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BRMP ACEH LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TAHUN 2025 AUDITED DAN TAHUN 2024 AUDITED

Uraian	Catatan	Tahun 2025 AUDITED			Tahun 2024 Audited
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	325.800.000,00	388.429.713,00	119,22	176.141.901,00
Jumlah Pendapatan		325.800.000,00	388.429.713,00	119,22	176.141.901,00
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	4.993.436.000,00	4.960.084.366,00	99,33	5.153.503.379,00
Belanja Barang	B.4.	4.688.835.000,00	4.514.328.196,00	96,28	4.466.126.830,00
Belanja Modal	B.5.	100.500.000,00	100.326.000,00	0,00	156.300.000,00
Jumlah Belanja		9.782.771.000,00	9.574.738.591,00	97,87	9.775.930.209,00

II. NERACA

BRMP ACEH
NERACA
PER TAHUN 2025 AUDITED DAN TAHUN 2024 AUDITED

Uraian	Catatan	Tahun 2025 AUDITED	Tahun 2024 Audited
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	29,00	75.675.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.1.3.	0,00	(373.750,00)
Piutang Bukan Pajak (NETTO)	C.1.4.	29,00	75.301.250,00
Persediaan	C.1.5.	922.203.900,00	165.073.070,00
Jumlah Aset Lancar		922.203.929,00	240.374.320,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	148.263.738.880,00	148.263.738.880,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	8.345.588.746,00	8.245.262.746,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	24.222.491.437,00	24.222.491.437,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	288.381.000,00	288.381.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	60.750.000,00	60.750.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7.	(15.603.540.155,00)	(14.257.338.162,00)
Jumlah Aset Tetap		165.577.409.908,00	166.823.285.901,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	6.115.000,00	6.115.000,00
Aset Lain-lain	C.4.2.	4.108.179.981,00	4.108.179.981,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3.	(3.965.882.407,00)	(3.966.676.280,00)
Jumlah Aset Lainnya		148.412.574,00	168.047.701,00
Jumlah Aset		166.648.026.411,00	167.231.707.922,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	10.742.867,00	28.390.306,00
Uang Muka dari KPPN	C.5.2.	0,00	0,00
Utang yang Belum Ditagihkan	C.5.3.	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		10.742.867,00	28.390.306,00
Jumlah Kewajiban		10.742.867,00	28.390.306,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	166.637.283.544,00	167.203.317.616,00
Jumlah Ekuitas		166.637.283.544,00	167.203.317.616,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		166.648.026.411,00	167.231.707.922,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BRMP ACEH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
TAHUN 2025 AUDITED DAN TAHUN 2024 AUDITED

Uraian	Catatan	Tahun 2025 Audited	Tahun 2024 Audited
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	311.069.544,00	152.811.842,00
JUMLAH PENDAPATAN		311.069.544,00	152.811.842,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	4.960.084.366,00	5.122.604.379,00
Beban Persediaan	D.3.	851.565.733,00	367.822.940,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.283.419.177,00	2.082.248.359,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	698.824.723,00	796.801.539,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	650.137.794,00	1.226.412.982,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	187.075.000,00	51.432.500,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	1.365.837.120,00	1.418.898.185,00
Beban Penyusutan Piutang Tak Tertagih	D.9.	(373.750,00)	373.750,00
JUMLAH BEBAN		10.996.570.163,00	11.096.568.634,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(10.685.500.619,00)	(10.943.756.792,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/ Defisit Pelepasan Aset		1.500.000,00	(199.000.000,00)
Beban Pelepasan Aset	D.9.	0,00	222.000.000,00
Pendapatan Pelepasan Aset	D.9	1.500.000,00	23.000.000,00
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		996.857.669,00	219.537.559,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	996.857.669,00	219.537.559,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	9.850.000,00	8.542.500,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9.	996.857.669,0	219.537.559,00
SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(9.687.142.950,00)	(10.923.219.233,00)
SURPLUS/DEFISIT - LO		(9.687.142.950,00)	(10.923.219.233,00)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BRMP ACEH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
TAHUN 2025 AUDITED DAN TAHUN 2024 AUDITED

Uraian	Catatan	Tahun 2025 AUDITED	Tahun 2024 Audited
EKUITAS AWAL	E.1.	167.203.317.616,00	168.428.601.500,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(9.687.142.950,00)	(10.923.219.233,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	(65.200.000,00)	98.147.041,00
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1.	0,00	0,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		(65.200.000,00)	0,00
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.2.	0,00	0,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.3.	0,00	98.147.041,00
LAIN-LAIN		0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	9.186.308.878,00	9.599.788.308,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	(566.034.072,00)	(1.225.283.884,00)
EKUITAS AKHIR	E.6.	166.637.283.544,00	167.203.317.616,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Profil dan Kebijakan Teknis

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN PERTANIAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Entitas berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas saat ini masih dalam pembahasan dan penyusunan, Visi dan Misi Kementerian Pertanian beserta Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2025-2028. Saat ini Visi dan Misi Kementerian Pertanian masih menggunakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2021-2024 adalah:

Visi

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi

- Mewujudkan ketahanan pangan.
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
- Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian dalam melaksanakan visi dan misinya mempunyai program Bantuan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024. Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi:

1. Pemberian penghargaan, dapat diberikan kepada perseorangan atau kelompok yang berjasa di bidang pertanian dan memenuhi kriteria yang dijabarkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangan;
2. Bantuan operasional, dapat diberikan kepada petani, pemuda tani, petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah;

3. Bantuan sarana/prasarana, dapat diberikan kepada kelompok masyarakat, kelompok tani/gabungan kelompok tani, kelompok siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri, brigade alsintan, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan brigade pengamat organisme pengganggu tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun (Karlabun);
4. Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/ bangunan dapat diberikan kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, kelompok tani/gabungan kelompok tani, brigade alsintan, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, brigade pengamat organisme pengganggu tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun (karlabun); dan
5. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga masyarakat desa hutan, regu pengendali OPT, rumah tangga miskin petani, siswa dan alumni Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri, mahasiswa dan alumni, kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani, kelompok penangkar, kelompok usaha bersama/kelembagaan ekonomi petani, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan dan lembaga Pendidikan.

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025

(menyesuaikan surat edaran Kementerian Keuangan per periode pelaporan) sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal Tahun 2025 AUDITED.

Laporan Keuangan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 17 Februari 2026 (setelah dilakukan tutup periode permanen periode 13).

Pada Tahun Anggaran 2025 Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp7.347.315.000,00. Selama periode berjalan, Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

1. Pagu Awal

Pagu Rp7.347.315.000,00

Blokir Rp281.195.000,00 (blokir Belanja bahan PNPB Rp3.298.000,00, Belanja Barang Non Operasional Lainnya PNPB Rp72.897.000,00, Belanja bahan layanan dukungan manajemen internal Rp70.920.000,00, Belanja barang persediaan barang konsumsi Rp25.000.000,00, dan Belanja perjalanan dinas biasa Rp.109.080.000,00).

2. Revisi 1

Pagu Rp7.347.315.000,00

Blokir Rp423.769.000,00 (blokir Belanja bahan PNPB Rp3.298.000,00, Belanja Barang Non Operasional Lainnya PNPB Rp72.897.000,00, Belanja keperluan perkantoran Rp26.241.000,00, Belanja barang operasional lainnya Rp2.000.000,00, Belanja bahan Rp89.603.000,00, Belanja barang persediaan barang konsumsi Rp57.400.000,00, Belanja jasa profesi Rp2.400.000,00, Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan Rp19.883.000,00, Belanja Pemeliharaan

peralatan dan mesin Rp40.967.000,00, dan Belanja perjalanan dinas biasa Rp109.080.000,00).

3. Revisi 2

Pagu Rp8.997.315.000,00

Blokir Rp1.931.195.000,00 (blokir Belanja bahan PNBK Rp3.298.000,00, Belanja barang non operasional lainnya PNBK Rp72.897.000,00, Belanja bahan layanan manajemen internal Rp 211.777.000,00, Belanja barang non operasional lainnya Rp67.200.000,00, Belanja barang persediaan barang konsumsi Rp33.343.000,00, Belanja sewa Rp37.200.000,00, Belanja jasa profesi Rp46.400.000,00, dan Belanja perjalanan dinas biasa Rp1.459.080.000,00).

4. Revisi 3

Pagu Rp8.997.315.000,00

Blokir Rp1.931.195.000,00 (blokir Belanja bahan PNBK Rp3.298.000,00, Belanja barang non operasional lainnya PNBK Rp72.897.000,00, Belanja bahan layanan manajemen internal Rp 211.777.000,00, Belanja barang non operasional lainnya Rp67.200.000,00, Belanja barang persediaan barang konsumsi Rp33.343.000,00, Belanja sewa Rp37.200.000,00, Belanja jasa profesi Rp46.400.000,00, dan Belanja perjalanan dinas biasa Rp1.459.080.000,00).

5. Revisi 4

Pagu Rp10.549.915.000,00

Blokir Rp960.538.000,00 (blokir Belanja bahan PNBK Rp3.298.000,00, Belanja barang non operasional lainnya PNBK Rp72.897.000,00, Belanja barang persediaan barang konsumsi kegiatan sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup Rp1.000.000,00, Belanja barang persediaan barang konsumsi kegiatan dukungan manajemen Rp8.343.000,00, Belanja perjalanan dinas biasa Rp810.000.000,00, Belanja bahan kegiatan layanan dukungan manajemen internal Rp21.540.000,00, Belanja barang persediaan barang konsumsi Rp1.000.000,00, Belanja perjalanan dinas biasa Rp42.460.000,00).

6. Revisi 5

Pagu Rp10.549.915.000,00

Blokir Rp960.538.000,00 (blokir Belanja bahan PNBK Rp3.298.000,00, Belanja barang non operasional lainnya PNBK Rp72.897.000,00, Belanja barang persediaan barang konsumsi kegiatan sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup Rp1.000.000,00, Belanja barang persediaan barang konsumsi kegiatan dukungan manajemen Rp8.343.000,00, Belanja perjalanan dinas biasa

Rp810.000.000,00, Belanja bahan kegiatan layanan dukungan manajemen internal Rp21.540.000,00, Belanja barang persediaan barang konsumsi Rp1.000.000,00, Belanja perjalanan dinas biasa Rp42.460.000,00).

7. Revisi 6

Pagu Rp10.549.915.000,00

Blokir Rp960.538.000,00 (blokir Belanja bahan PNBK Rp3.298.000,00, Belanja barang non operasional lainnya PNBK Rp72.897.000,00, Belanja barang persediaan barang konsumsi kegiatan sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup Rp1.000.000,00, Belanja barang persediaan barang konsumsi kegiatan dukungan manajemen Rp8.343.000,00, Belanja perjalanan dinas biasa Rp810.000.000,00, Belanja bahan kegiatan layanan dukungan manajemen internal Rp21.540.000,00, Belanja barang persediaan barang konsumsi Rp1.000.000,00, Belanja perjalanan dinas biasa Rp42.460.000,00).

8. Revisi 7

Pagu Rp9.587.781.000,00

Blokir Rp111.258.000,00 (blokir Belanja bahan PNBK Rp3.298.000,00, Belanja barang non operasional lainnya PNBK Rp72.897.000,00, Belanja barang persediaan barang konsumsi kegiatan sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup Rp1.000.000,00, Belanja barang persediaan barang konsumsi kegiatan dukungan manajemen Rp8.343.000,00, Belanja perjalanan dinas biasa layanan dukungan manajemen internal Rp16.505.000,00, Belanja perjalanan dinas biasa Layanan manajemen kinerja internal Rp16.215.000,00).

9. Revisi 8

Pagu Rp9.723.771.000,00

Blokir Rp42.063.000,00 (blokir Belanja barang persediaan barang konsumsi kegiatan sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup Rp1.000.000,00, Belanja barang persediaan barang konsumsi kegiatan dukungan manajemen Rp8.343.000,00, Belanja perjalanan dinas biasa layanan dukungan manajemen internal Rp16.505.000,00, Belanja perjalanan dinas biasa Layanan manajemen kinerja internal Rp16.215.000,00).

10. Revisi 9

Pagu Rp9.782.771.000,00

Blokir Rp42.063.000,00 (blokir Belanja barang persediaan barang konsumsi kegiatan sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup Rp1.000.000,00, Belanja barang persediaan barang konsumsi kegiatan dukungan

manajemen Rp8.343.000,00, Belanja perjalanan dinas biasa layanan dukungan manajemen internal Rp16.505.000,00, Belanja perjalanan dinas biasa Layanan manajemen kinerja internal Rp16.215.000,00.

11. Revisi 10

Pagu Rp9.782.771.000,00

Blokir Rp42.063.000,00 (blokir Belanja barang persediaan barang konsumsi kegiatan sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup Rp1.000.000,00, Belanja barang persediaan barang konsumsi kegiatan dukungan manajemen Rp8.343.000,00, Belanja perjalanan dinas biasa layanan dukungan manajemen internal Rp16.505.000,00, Belanja perjalanan dinas biasa Layanan manajemen kinerja internal Rp16.215.000,00.

12. Revisi 11

Pagu Rp9.782.771.000,00

Blokir Rp32.720.000,00 (blokir Belanja perjalanan dinas biasa layanan dukungan manajemen internal Rp16.505.000,00, Belanja perjalanan dinas biasa Layanan manajemen kinerja internal Rp16.215.000,00.

13. Revisi 12

Pagu Rp9.782.771.000,00

Blokir Rp32.720.000,00 (blokir Belanja perjalanan dinas biasa layanan dukungan manajemen internal Rp16.505.000,00, Belanja perjalanan dinas biasa Layanan manajemen kinerja internal Rp16.215.000,00.

14. Revisi 13

Pagu Rp9.782.771.000,00

Blokir Rp32.720.000,00 (blokir Belanja perjalanan dinas biasa layanan dukungan manajemen internal Rp16.505.000,00, Belanja perjalanan dinas biasa Layanan manajemen kinerja internal Rp16.215.000,00.

Sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp9.782.771.000,00.

Tabel A.2.1 Anggaran Satuan Kerja Tahun 2025

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
2025	9.782.771.000,00
2024	10.150.655.000,00
2023	9.436.650.000,00
2022	8.599.474.000,00

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

Pendapatan - LRA

1. Pendapatan- LRA

Definisi:

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan:

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran:

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Pendapatan - LO

2. Pendapatan- LO

Definisi:

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan:

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBP-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui *self assessment*, *official assessment*, dan *Withholding tax system*.
- b. Pendapatan PNBP-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNBP-LO perizinan, Pendapatan PNBP-LO layanan, Pendapatan PNBP-LO Eksploitasi/ Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran:

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus

diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

Belanja

3. Belanja

Definisi:

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan:

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran:

Belanja diukur berdasarkan asas bru.to dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

Beban

4. Beban

Definisi:

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau hiaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan:

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
 - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
 - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
- c. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayakan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Pengukuran:

- a. Beban Pegawai
Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.
- b. Beban Persediaan
Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.
- c. Beban Barang dan Jasa
Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang

telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

d. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

f. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

g. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

h. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan:

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penunjaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa

yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU.

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih.

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5%o (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan:

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;

- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya.

Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap:

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- 5) Penghentian dan Pelepasan
- 6) Penilaian kembali
- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian. Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan

Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2024, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran:

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

Properti Investasi

c. Properti Investasi

Definisi:

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan:

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran:

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan:

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan:

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.

- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran:

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

Penyisihan Piutang Jangka Panjang

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih.

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5%o (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai

pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

Aset Lainnya

f. Aset Lainnya

Definisi:

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi:

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan:

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai

suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran:

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan:

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut:
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu

diungkapkan antara lain adalah tujuan penyisihan dana, dasar hukum dilakukannya penyisihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.

- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi:

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Kewajiban

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi:

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan:

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan

pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran:

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi:

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan:

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran:

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang

harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi:

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan:

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran:

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

Ekuitas

7. Ekuitas

Definisi:

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan:

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran:

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan:

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS REALISASI ANGGARAN

Pendapatan
Penerimaan Negara
Bukan Pajak
Rp388.429.713,00

B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak per Tahun 2025 AUDITED adalah sebesar Rp388.429.713,00 atau 119,22% dari anggaran sebesar Rp325.800.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNBPA TA 2025

	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 AUDITED (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 Audited (Rp)
424	Pendapatan BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Pendapatan BLU Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Pendapatan PNBPA Lainnya	325.800.000,00	388.429.713,00	119,22	176.141.901,00
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	325.800.000,00	312.569.544,00	95,94	175.811.842,00
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	0,00
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4258	Pendapatan Denda	0,00	0,00	0,00	0,00
4259	Pendapatan Lain-Lain	0,00	75.860.169,00	0,00	180.059,00
	Jumlah	325.800.000,00	388.429.713,00	119,22	176.141.901,00

Realisasi PNPB TA 2025 berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada **Lampiran B.1.1.**

B.1.1. Pendapatan BLU

Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran pendapatan BLU sebesar Rp0,00. Realisasi pendapatan BLU TA 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi Pendapatan BLU TA 2025.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLU Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan Badan Layanan Umum per Tahun 2025 AUDITED sebagai berikut: -

B.1.2. PNPB Lainnya

Realisasi Pendapatan PNPB Lainnya per Tahun 2025 AUDITED adalah sebesar Rp388.429.713,00 atau 119,22% dari anggaran pendapatan PNPB Lainnya sebesar Rp325.800.000,00. Realisasi pendapatan PNPB Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp212.287.812,00 atau 120,52% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNPB Lainnya TA 2025.

Tabel B.1.2.1 Anggaran dan Realisasi PNPB Lainnya TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 AUDITED (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 Audited (Rp)
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha,	325.800.000,00	312.569.544,00	95,94	175.811.842,00

dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN				
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Pendapatan Denda	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0,00	75.860.169,00	0,00	180.059,00
Jumlah	325.800.000,00	388.429.713,00	119,22	176.141.901,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNPB Lainnya per Tahun 2025 AUDITED sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp312.569.544,00 merupakan penerimaan yang berasal dari Perolehan hasil pertanian, diantaranya penjualan benih tanaman, pendapatan dari pemindahan BMN Lainnya dan pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi berupa biaya sewa rumah dinas.
2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp0,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari layanan jasa layanan pengujian dan analisis,
3. Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan sebesar Rp0,00 terdiri dari pendapatan di Tahun 2025 sebesar Rp0,00.
4. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi merupakan pendapatan dari pelayanan jasa pendidikan, budaya, riset dan teknologi satker di lingkungan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh. Realisasi pendapatan tersebut disajikan sebesar Rp0,00.
5. Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp0,00 yang berasal dari setoran biaya perjalanan dinas dalam rangka layanan pengujian yang dibebankan kepada pengguna jasa.

Sesuai surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-748/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penggunaan dana Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian/Lembaga, besaran penggunaan dana PNBP untuk masing-masing Eselon I sebagai berikut:

- a. Satuan Kerja Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Pangan dan Perizinan Pertanian, Setjen, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 58,00%
 - b. Ditjen TP, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 66,05%
 - c. Ditjen Bun, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 80,00%
 - d. Ditjen PKH, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 67,00%
 - e. BSIP, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 95,00%
 - f. BPPSDMP, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 86,00%
 - g. Barantan, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 70,00%
6. Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp0,00 berasal dari angsuran dan pelunasan TP/TGR merupakan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, setoran jasa giro bank.
 7. Pendapatan Denda sebesar Rp0,00 merupakan penerimaan yang berasal dari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
 8. Pendapatan lain-lain sebesar Rp75.860.169,00 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel B.1.2.2 Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2025

Kode Akun	Uraian	Realisasi Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Keterangan
4259	Pendapatan Lain-lain		
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	75.860.169,00	
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	0,00	
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	0,00	
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran yang Lalu	0,00	
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	
	Jumlah Pendapatan	75.860.169,00-	

Pemungutan PNBP mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai berikut:

1. PP Nomor 8 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh.

2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang bersifat volatil yang berlaku pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh, dan Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh. Sedangkan untuk PNBPN terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBPN yang bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBPN mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.

Dapat dijelaskan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu per Tahun 2025 AUDITED sebagai berikut:

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911) Pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh sebesar Rp74.750.000,00 merupakan pengembalian tunjangan jabatan fungsional peneliti akibat perubahan organisasi dari Badan Litbang Pertanian menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
2. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911) pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh sebesar Rp925.000,00 merupakan pengembalian tunjangan umum dan fungsional petugas belajar atas nama drh. Firda Farida Rahmah.
3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911) pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh sebesar Rp185.000,00 merupakan pengembalian tunjangan umum atas nama Fawwa Rahly, M.Si
4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911) pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh sebesar Rp169,00 merupakan pengembalian pembulatan gaji.

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi PNBPN per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.1.2.**

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja per Tahun 2025 AUDITED adalah sebesar Rp9.574.738.591,00 atau 97,87% dari anggaran belanja sebesar Rp9.782.771.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Belanja
Rp9.574.738.591,00

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 AUDITED (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 Audited (Rp)
Belanja Pegawai	4.993.436.000,00	4.960.084.366,00	99,33	5.153.503.379,00
Belanja Barang	4.688.835.000,00	4.514.328.196,00	96,28	4.466.126.830,00
Belanja Modal	100.500.000,00	100.326.000,00	99,83	156.300.000,00
Jumlah	9.782.771.000,00	9.574.738.591,00	97,87	9.775.930.209,00

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 AUDITED (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 Audited (Rp)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	221.185.000,00	215.883.450,00	97,60	1.652.448.850,00
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.552.600.000,00	1.538.841.413,00	99,11	585.827.000,00
Program Dukungan Manajemen Internal	7.067.481.000,00	7.016.748.222,00	99,28	7.539.291.162,00
Jumlah	9.782.771.000,00	9.575.814.029,00	98,21	9.777.567.012,00

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada **Lampiran B.2**.

Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(201.191.618,00) atau (2,06)%, apabila dibandingkan TA 2024. Penurunan tersebut disebabkan antara lain:

1. Adanya pemblokiran pagu anggaran hingga Bulan Desember 2025;
2. Adanya 9 orang pegawai yang memasuki masa purna tugas.

Belanja Pegawai
Rp4.960.084.395,00

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing sebesar Rp4.960.084.366,00 dan Rp5.153.503.379,00. Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(193.418.984,00) atau (3,75)% dibandingkan TA 2024. Penurunan tersebut terjadi karena adanya 5 orang pegawai yang memasuki masa purna tugas sejak periode Desember 2024 hingga Desember 2025.

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 menurut klasifikasi serta eselon I.

Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 AUDITED (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 Audited (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	4.815.446.000,00	4.789.470.955,00	99,46	5.123.529.379,00
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	127.992.000,00	126.669.440,00	98,97	0,00
Belanja Lembur	49.998.000,00	43.944.000,00	87,89	29.974.000,00
Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.993.436.000,00	4.960.084.366,00	99,33	5.153.503.379,00

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.3.2.**

Belanja Barang
Rp4.514.328.196,00

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing sebesar Rp4.514.328.196,00 dan Rp4.466.126.830,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025
Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 AUDITED (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 Audited (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	935.530.000,00	931.230.170,00	99,54	661.886.892,00
Belanja Barang Non Operasional	1.080.122.000,00	1.020.981.200,00	94,52	1.163.161.101,00
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan	892.443.000,00	878.491.063,00	98,44	354.518.650,00
Belanja Jasa				
Belanja Jasa	378.384.000,00	348.855.246,00	92,20	263.365.666,00
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Pemeliharaan	690.276.000,00	684.632.723,00	99,18	796.801.539,00
Belanja Perjalanan Dinas				
Belanja Perjalanan DN	712.080.000,00	650.137.794,00	91,30	1.226.412.982,00
Belanja Perjalanan LN	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja BLU				
Belanja Barang BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda				
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.688.835.000,00	4.514.328.196,00	96,28	4.466.126.830,00

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp4.514.328.196,00 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025
Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 AUDITED (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 Audited (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional				
Belanja Keperluan Perkantoran	658.850.000,00	654.619.670,00	99,36	428.110.000,00
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	81.680.000,00	81.680.000,00	100	65.160.000,00
Belanja Barang Operasional Lainnya	195.000.000,00	194.930.500,00	99,96	168.596.892,00
Belanja Barang Non Operasional				
Belanja Bahan	269.497.000,00	223.156.200,00	82,80	929.256.101,00
Belanja Honor Output Kegiatan	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	797.880.000,00	785.080.000,00	98,40	224.305.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	12.745.000,00	12.745.000,00	100	0,00
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0,00		0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan				
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	115.900.000,00	115.865.650,00	99,97	354.518.650,00
Belanja Barang Persediaan bahan baku	776.543.000,00	762.625.413,00	98,21	0,00
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	279.836.000,00	274.423.250,00	98,07	334.597.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	119.896.000,00

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	410.440.000,00	410.209.473,00	99,94	342.308.539,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja BLU				
Belanja Barang BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan – BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.598.371.000,00	3.515.335.156,00	97,69	4.202.761.164,00

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.4.1**.

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk tahun yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi belanja tersebut diberikan dalam bentuk barang dan uang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.4 Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Satker

Uraian	Berupa Uang		Berupa Barang		Total	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Fisik dan Penunjang dana DK/TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rincian Jenis Bantuan Pemerintah berdasarkan program dapat dilihat pada **Lampiran B.4.2.**

Penjelasan alokasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda masing-masing adalah sebagai berikut:

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp0,00 untuk (disebutkan jumlah) kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Satker BRMP Aceh

Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Nama Kegiatan	Barang	0,00	0,00	0,00
	Uang	0,00	0,00	0,00
Nama Kegiatan	Barang	0,00	0,00	0,00
	Uang	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

Dari realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebesar Rp0,00 telah diunggah dokumen pertanggungjawabannya melalui aplikasi Basbanpem sebesar Rp0,00 dari pertanggungjawaban tersebut telah dilakukan revidi oleh Inspektorat sebesar Rp0,00.

Belanja Modal
Rp100.326.000,00

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing adalah sebesar Rp100.326.000,00 dan Rp156.300.000,00. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(55.794.000,00) atau (35,81)% dibandingkan periode TA 2024. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi karena tidak adanya Belanja modal pada periode tersebut.

Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 AUDITED (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 Audited (Rp)
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.500.000,00	100.326.000,00	99,83	6.300.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	100.326.000,00	0,00	156.300.000,00

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2025 dapat dilihat pada **Lampiran B.5**.

*Belanja Modal Tanah
Rp0,00*

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi karena tidak adanya Belanja modal pada periode tersebut.

*Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp100.326.000,00*

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing adalah sebesar Rp100.326.000,00 dan Rp156.300.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(55.794.000,00) atau (35,81)% dibandingkan TA 2024.

Tabel B.2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 AUDITED (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 Audited (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.500.000,00	100.326.000,00	99,83	6.300.000,00

Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	100.500.000,00	100.326.000,00	99,83	6.300.000,00

Dari nilai realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp100.326.000,00, sebesar Rp100.326.000,00 menambah saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

*Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Rp0,00*

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024. Tidak adanya perubahan anggaran belanja gedung dan bangunan TA 2025, salah satunya dipengaruhi karena tidak adanya anggaran Belanja modal pada periode tersebut.

Tabel B.2.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 AUDITED (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 Audited (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00

Dari nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,00 tidak menambah saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan
Rp0,00

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024.

Tabel B.2.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 AUDITED (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 Audited (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Realisasi belanja modal irigasi serta belanja modal jaringan TA 2025 yang disajikan pada tabel di atas.

Dari nilai realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar Rp0,00, sebesar Rp0,00 tidak menambah saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Belanja Modal Lainnya
Rp0,00

5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan Tahun

2025 AUDITED tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan yang berakhir sampai dengan periode pelaporan TAYL.

Tabel B.2.3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 AUDITED (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 Audited (Rp)
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Belanja Modal BLU
Rp0,00

6. Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024 dikarenakan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh bukan merupakan Satker BLU.

Tabel B.2.3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 AUDITED (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 Audited (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset

Rp166.648.026.382,00

C.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp166.637.283.544,00 dan Rp167.231.707.922,00. Saldo Aset per Tahun 2025 AUDITED mengalami kenaikan sebesar Rp104.175.391 atau 0,06%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per Tahun 2024 Audited. Rincian saldo Aset per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited

Uraian	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)
Aset Lancar	922.203.929,00	240.374.320,00
Aset Tetap	165.577.409.908,00	166.823.285.901,00
Properti Investasi	0,00	0,00
Piutang Jangka Panjang	0,00	0,00
Aset Lainnya	148.412.574,00	168.047.701,00
Jumlah	166.637.283.544,00	167.231.707.922,00

Aset Lancar

Rp922.203.900,00

C.1.1. ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp922.203.929,00 dan Rp240.374.320,00. Saldo Aset Lancar per Tahun 2025 AUDITED mengalami kenaikan sebesar Rp681.829.580,00 atau 283,65 %, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per Tahun 2024 Audited. Rincian saldo Aset Lancar per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited disajikan pada 56able berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited

Uraian	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	0,00
Kas pada BLU	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek – BLU	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	0,00	75.675.000,00
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0,00	0,00
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	(373.750)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	0,00	75.301.250,00
Persediaan	922.203.929,00	165.073.070,00
Jumlah	922.203.929,00	240.374.320,00

Kas Dibendahara
Pengeluaran
Rp0,00

C.1.1.1. Kas Di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Tahun 2025 AUDITED tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Tahun 2024 Audited. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.1. Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran
per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited**

No	Keterangan	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0,00	0,00	0,00

2	Bank BSI Nomor Rekening 81011065673921000	0,00	0,00	0,00
3	Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

Rincian daftar rekening Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.1.**

C.1.1.2. Kas Di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per Tahun 2025 AUDITED tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per Tahun 2024 Audited.

**Tabel C.2. Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan
per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited**

No	Keterangan	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0,00	0,00	0,00
2	Bank Mandiri No.Rekening xxxxxx	0,00	0,00	0,00
3	Dst..	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

Rincian daftar rekening Bendahara Penerimaan Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.2.**

C.1.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per Tahun 2025 AUDITED tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per Tahun 2024 Audited. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2025 AUDITED disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.3. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas
per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited**

Keterangan	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya dari Hibah	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya di BLU	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Rincian daftar rekening Kas Lainnya Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.3.**

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Tidak ada saldo kas lainnya di bendahara Pengeluaran per periode Tahun 2025 AUDITED pada satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh.

2. Kas Lainnya dari Hibah

Saldo Kas Lainnya dari Hibah merupakan saldo kas hibah langsung yang telah disahkan. Pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh, tidak terdapat saldo kas lainnya dari hibah.

3. Kas Lainnya di BLU

Saldo Kas Lainnya di BLU per Tahun 2025 AUDITED sebesar Rp0,00 dikarenakan satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh bukan merupakan satker BLU.

Kas Pada Badan
Layanan Umum
Rp0,00

C.1.1.4. Kas Pada Badan Layanan Umum

Kas pada BLU adalah saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Saldo Kas pada BLU per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas pada BLU per Tahun 2025 AUDITED tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kas pada BLU per Tahun 2024 Audited.

Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh bukan merupakan satker BLU sehingga tidak memiliki kas pada BLU.

Investasi Jangka
Pendek - BLU
Rp0,00

C.1.1.5. Investasi Jangka Pendek – BLU

Investasi Jangka Pendek – BLU adalah investasi pada satker BLU yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh bukan merupakan satker BLU sehingga tidak memiliki Investasi Jangka Pendek – BLU.

Belanja Dibayar
Dimuka (Prepaid)
Rp0,00

C.1.1.6. Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per Tahun 2025 AUDITED tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan dengan saldo Belanja Dibayar Dimuka per Tahun 2024 Audited. Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.6. Saldo Belanja Dibayar Dimuka
per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2025 AUDITED**

No	Jenis Belanja	Uraian	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pegawai	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang	Belanja Barang Operasional	0,00	0,00	0,00
		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang Non Operasional	0,00	0,00	0,00
		Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	0,00	0,00	0,00
		Total	0,00	0,00	0,00

Pendapatan Yang
Masih Harus Diterima
Rp0,00

C.1.1.7. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBPN yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Tahun 2025 AUDITED tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Tahun 2024 Audited. Rincian saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.7. Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited**

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00

2	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

Piutang Bukan Pajak
Rp0,00

C.1.1.8. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp75.675.000,00. Saldo Piutang Bukan Pajak per Tahun 2025 AUDITED mengalami penurunan sebesar Rp(75.675.000,00) atau (100)% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per Tahun 2024 Audited. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.8. Saldo Piutang Bukan Pajak
per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2023, 2025	0,00	74.750.000,00	(74.750.000,00)
		2025	0,00	925.000,00	(925.000,00)
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	2025	0,00	0,00	0,00
4253	Pendapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial. Dan Keagamaan	2025	0,00	0,00	0,00
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	2025	0,00	0,00	0,00
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan	2025	0,00	0,00	0,00

	dan Pengelolaan Keuangan				
4258	Pendapatan Denda	2025	0,00	0,00	0,00
4259	Pendapatan Lain-Lain	2025	0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	75.675.000,00	(75.675.000,00)

Detail rincian Piutang Bukan Pajak untuk masing-masing nama debitur disajikan pada **Lampiran C.8**.

Bagian Lancar Tagihan
TP/TGR
Rp0,00

C.1.1.9. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per Tahun 2024 Audited tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per Tahun 2024 Audited. Rincian saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.9. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited

No	Uraian	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Tuntutan Perbendaharaan	0,00	0,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

Detail rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR untuk masing-masing nama debitur disajikan pada **Lampiran C.9**.

Piutang dari Kegiatan
Operasional BLU
Rp0,00

C.1.1.10. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU.

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Tahun 2025 AUDITED mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Tahun 2024 Audited.

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih
Rp0,00

C.1.1.11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp(373.750,00). Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per Tahun 2025 AUDITED mengalami penurunan sebesar Rp(373.750,00) atau (100)% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per Tahun 2024 Audited. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Juni 2024 dan Tahun 2024 Audited disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.11. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited

No.	Jenis Piutang	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak	0,00	(373.750,00)	(373.750,00)
	Jumlah	0,00	(373.750,00)	(373.750,00)
2	Bagian Lancar TP	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00
3	Bagian Lancar TGR	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00
4	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00
		0,00	(373.750,00)	(373.750,00)

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan pada Lampiran C.11.1, Lampiran C.11.2, dan Lampiran C.11.3.

Persediaan

Rp922.203.900,00

C.1.1.12. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp922.203.929,00 dan Rp165.073.070,00. Saldo Persediaan per Tahun 2025 AUDITED mengalami kenaikan sebesar Rp757.130.830,00 atau 458,66% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per Tahun 2024 Audited. Rincian saldo Persediaan per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.12.1. Saldo Persediaan per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited

No.	Uraian Persediaan	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	24.806.400,00	12.073.070,00	12.733.330,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
3	Suku Cadang	0,00	0,00	0,00
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	897.397.500,00	153.000.000,00	744.397.500,00
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
8	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00	0,00	0,00
9	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	0,00	0,00	0,00
10	Bahan Baku	0,00	0,00	0,00

11	Persediaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Total		922.203.929,00	165.073.070,00	757.130.830,00

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat mutasi tambah saldo Persediaan dengan nilai signifikan antara lain barang konsumsi sebesar Rp12.733.330,00; Persediaan berupa hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp744.397.500,00. Mutasi tambah yang terjadi di Tahun 2025 tersebut dipengaruhi oleh kejadian penting berikut:

Penerapan Petunjuk Teknis Akuntansi 25: Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang Tidak dikuasai, dan KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan

Pada 30 Desember 2024 Dirjen Perbendaharaan telah menerbitkan surat Nomor S-221/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi 25: Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang Tidak dikuasai, dan KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan. Berdasarkan petunjuk teknis akuntansi tersebut, atas persediaan yang berasal dari Belanja Barang 526 yang telah diserahkan ke pemda sehingga fisiknya tidak lagi dikuasai oleh Kementerian Pertanian, dilakukan pembebanan sebagai Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat sehingga tidak lagi dicatat di Neraca (*off balance sheet*). Namun demikian, atas barang tersebut masih dicatat dalam Laporan BMN sebagai Daftar Barang Persediaan yang Tidak dikuasai.

Berdasarkan Laporan BMN, saldo barang persediaan yang tidak dikuasai per Tahun 2025 AUDITED disajikan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.12.2. Rekap Barang Persediaan yang Tidak dikuasai per Tahun 2025 AUDITED

No.	Jenis Persediaan	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00	0,00
	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00
Total		0,00	0,00

C.1.2. ASET TETAP*Aset Tetap**Rp165.577.409.908,00*

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp165.577.409.908,00 dan Rp166.823.285.901,00. Saldo Aset Tetap per Tahun 2025 AUDITED mengalami penurunan sebesar Rp(567.599.958,00) atau (0,34)% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per Tahun 2024 Audited. Rincian saldo Aset Tetap per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.12. Rincian Aset Tetap
per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited**

No	Jenis Aset Tetap	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	148.263.738.880,00	148.263.738.880,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	8.345.588.746,00	8.245.262.746,00	100.326.000,00
3	Gedung dan Bangunan	24.222.491.437,00	24.222.491.437,00	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	288.381.000,00	288.381.000,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	60.750.000,00	60.750.000,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
8	Akumulasi Penyusutan	(15.603.540.155,00)	(14.257.338.162,00)	(667.925.958,00)
Jumlah		165.577.409.908,00	166.823.285.901,00	(567.599.958,00)

*Tanah**Rp148.263.738.880,00***C.1.2.1. Tanah**

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp148.263.738.880,00 dan Rp148.263.738.880,00. Saldo Aset Tetap Tanah per Tahun 2025 AUDITED tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per Tahun 2024 Audited. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per Tahun 2025 AUDITED disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.1. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian		Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah Tahun 2024 Audited		148.263.738.880,00
B	Mutasi Tambah		0,00
1	Transfer Masuk		0,00
2	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah		0,00
3	Reklasifikasi Masuk		0,00
4	Perolehan Lainnya		0,00
5	Saldo Awal		0,00
6	Hibah Masuk		0,00
7	Perubahan PI ke BMN		0,00
C	Mutasi Kurang		0,00
1	Transfer Keluar		0,00
2	Koreksi Pencatatan		0,00
3	Hibah Keluar		0,00
4	Reklasifikasi Keluar		0,00
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang		0,00
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan		0,00
D	Saldo Tanah Tahun 2025 AUDITED		148.263.738.880,00

Rincian saldo Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.2. Rincian Tanah Berdasarkan NUP

No.	NUP	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	1	122.241.848.880,00	122.241.848.880,00	0,00
2	2	4.171.959.000,00	4.171.959.000,00	0,00
3	2	2.919.420.000,00	2.919.420.000,00	0,00
4	4	416.368.000,00	416.368.000,00	0,00
5	5	1.145.991.000,00	1.145.991.000,00	0,00
6	7	1.180.685.000,00	1.180.685.000,00	0,00
7	8	4.102.145.000,00	4.102.145.000,00	0,00
8	11	12.085.322.000,00	12.085.322.000,00	0,00
Jumlah		148.263.738.880,00	148.263.738.880,00	0,00

Dari jumlah aset tetap tanah yang disajikan, terdapat 8 (delapan) NUP Aset Tetap Tanah yang dicatat dengan nilai perolehan sebesar Rp148.263.738.880,00 sudah didukung dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat. Namun aset tetap tanah

yang belum didukung bukti kepemilikan berupa sertifikat, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel C.13.3. Rekap Aset Tetap Tanah Belum Bersertifikat

No	Jenis Tanah	Jml NUP	Nilai Perolehan (Rp)
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
Jumlah		-	-

Peralatan dan Mesin
Rp8.345.588.746,00

C.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp8.345.588.746,00 dan Rp8.245.262.746,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per Tahun 2025 AUDITED mengalami kenaikan sebesar Rp100.326.000,00 atau 1,22% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 Audited. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per Tahun 2025 AUDITED disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin per Tahun 2024 Audited	8.245.262.746,00
B	Mutasi Tambah	0,00
1	Transfer Masuk	0,00
2	Pembelian	100.326.000,00
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0,00
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0,00
5	Reklasifikasi Masuk	0,00
6	Perolehan Lainnya	0,00
7	Saldo Awal	0,00
8	Hibah Masuk	0,00
9	Pengembangan Melalui KDP	0,00
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0,00
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0,00

12	Koreksi Susulan		0,00
13	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP		0,00
C	Mutasi Kurang		0,00
1	Transfer Keluar		0,00
2	Koreksi Pencatatan		0,00
3	Hibah Keluar		0,00
4	Reklasifikasi Keluar		0,00
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang		0,00
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan		0,00
7	Penghapusan		0,00
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan		0,00
D	Saldo Peralatan Mesin per Tahun 2025 AUDITED		8.345.588.746,00

Gedung dan Bangunan
Rp24.222.491.437,00

C.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp24.222.491.437,00 dan Rp24.222.491.437,00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per Tahun 2025 AUDITED tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per Tahun 2024 Audited. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per Tahun 2025 AUDITED disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan per Tahun 2024 Audited	24.222.491.437,00
B	Mutasi Tambah	0,00
1	Transfer Masuk	0,00
2	Pembelian	0,00
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0,00
5	Reklasifikasi Masuk	0,00
6	Perolehan Lainnya	0,00
7	Saldo Awal	0,00

8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP		0,00
9	Hibah Masuk		0,00
10	Pengembangan Melalui KDP		0,00
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)		0,00
12	Koreksi Susulan		0,00
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi		0,00
14	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan		0,00
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung		0,00
C	Mutasi Kurang		0,00
1	Transfer Keluar		0,00
2	Koreksi Pencatatan		0,00
3	Hibah Keluar		0,00
4	Reklasifikasi Keluar		0,00
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang		0,00
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan		0,00
7	Penghapusan		0,00
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan		0,00
9	Perubahan BMN Ke PI		0,00
D	Saldo Gedung Bangunan per Tahun 2025 AUDITED		24.222.491.437,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp288.381.000,00

C.1.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp288.381.000,00 dan Rp288.381.000,00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per Tahun 2025 AUDITED tidak mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per Tahun 2024 Audited. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per Tahun 2025 AUDITED disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan Tahun 2024 Audited	288.381.000,00
B	Mutasi Tambah	0,00
1	Transfer Masuk	0,00

2	Pembelian		0,00
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif		0,00
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah		0,00
5	Reklasifikasi Masuk		0,00
6	Perolehan Lainnya		0,00
7	Saldo Awal		0,00
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP		0,00
9	Pengembangan Melalui KDP		0,00
10	Koreksi Susulan		0,00
C	Total Mutasi Kurang		0,00
1	Transfer Keluar		0,00
2	Koreksi Pencatatan		0,00
3	Hibah Keluar		0,00
4	Reklasifikasi Keluar		0,00
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang		0,00
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan		0,00
7	Penghapusan		0,00
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan per Tahun 2025 AUDITED		288.381.000,00

Aset Tetap Lainnya
Rp60.750.000,00

C.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp60.750.000,00 dan Rp60.750.000,00. Saldo Aset Tetap Lainnya per Tahun 2025 AUDITED tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per Tahun 2024 Audited. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per Tahun 2025 AUDITED disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 Audited	60.750.000,00
B	Mutasi Tambah	0,00
1	Transfer Masuk	0,00
2	Pembelian	0,00

3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif		0,00
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah		0,00
5	Reklasifikasi Masuk		0,00
6	Saldo Awal		0,00
7	Koreksi Susulan		0,00
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung		0,00
C	Mutasi Kurang		0,00
1	Transfer Keluar		0,00
2	Koreksi Pencatatan		0,00
3	Hibah Keluar		0,00
4	Reklasifikasi Keluar		0,00
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang		0,00
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan		0,00
7	Penghapusan		0,00
D	Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 AUDITED		60.750.000,00

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp0,00

C.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per Tahun 2025 AUDITED tidak mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per Tahun 2024 Audited. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per Tahun 2025 AUDITED disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.17. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2024 Audited	0,00
B	Mutasi Tambah	0,00
1	Perolehan/Penambahan KDP	0,00
2	Pengembangan KDP	0,00

3	Koreksi Nilai KDP Bertambah	0,00
4	Reklasifikasi Masuk KDP	0,00
5	Perolehan Lainnya KDP	0,00
6	Saldo Awal KDP	0,00
C	Mutasi Kurang	0,00
1	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0,00
2	Pengembangan Melalui KDP	0,00
3	Koreksi Pencatatan KDP	0,00
4	Penghapusan/Penghentian KDP	0,00
5	Koreksi Nilai KDP Berkurang	0,00
6	Reklasifikasi Keluar KDP	0,00
7	Transfer Keluar KDP	0,00
D	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2025 AUDITED	0,00

Rincian saldo KDP per Tahun 2025 AUDITED menurut (satker) disajikan pada **Lampiran C.1.2.6.**

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(15.603.540.155,00)*

C.1.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp(15.603.540.155,00) dan Rp(14.257.338.162,00). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Tahun 2025 AUDITED mengalami penurunan sebesar Rp(667.925.958,00) atau 4,68% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Tahun 2024 Audited. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Tahun 2025 AUDITED disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.18. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	(7.917.947.170,00)	(7.510.432.184,00)	(407.514.986,00)
2	Gedung dan Bangunan	(7.591.165.467,00)	(6.662.144.404,00)	(929.021.063,00)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(94.427.518,00)	(84.761.574,00)	(9.665.944,00)
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		(15.603.540.155,00)	(14.257.338.162,00)	(667.925.958,00)

Jika dibandingkan, terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No	Jenis Aset Tetap	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	(407.514.986,00)	(407.514.986,00)	0,00
2	Gedung dan Bangunan	(929.021.063,00)	(929.021.063,00)	0,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(9.665.944,00)	(9.665.944,00)	0,00
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	(667.925.958,00)	(667.925.958,00)	0,00

Selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan sebesar Rp0,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Akun Beban Penyusutan	Penjelasan Selisih	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Transfer Keluar	0,00
	Transfer Masuk	0,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0,00
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0,00
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00
Jumlah		0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00
	Transfer Keluar	0,00
	Transfer Masuk	0,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0,00
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0,00
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00
	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	0,00
Jumlah		0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Transfer Keluar	0,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0,00
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	Transfer Keluar	0,00
	Transfer Masuk	0,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0,00

	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0,00
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	Transfer Keluar	0,00
	Transfer Masuk	0,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0,00
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00
Jumlah		0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Transfer Keluar	0,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0,00
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0,00
Jumlah		0,00

Properti Investasi
Rp0,00

C.1.2.8. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Properti Investasi Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Properti Investasi per Tahun 2025 AUDITED tidak mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Properti Investasi per Tahun 2024 Audited. Rincian saldo Properti Investasi menurut jenis Aset disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.19. Saldo Properti Investasi
per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited**

No	Jenis Aset	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	-	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

Sehubungan dengan penyajian Properti Investasi, Kementerian Pertanian berpedoman pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 3813/KPTS/PL-330/A4/11/20xx tanggal 11 November 20xx tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi BMN yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi Lingkup Kementerian Pertanian.

C.1.2.9. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per Tahun 2025 AUDITED tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per Tahun 2025 AUDITED. Properti Investasi yang disusutkan hanya aset berupa Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.20. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited

No	jenis Aset	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	-	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

C.1.3. PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Jangka Panjang per Tahun 2025 AUDITED tidak mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang per Tahun 2024 Audited. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.21. Saldo Piutang Jangka Panjang
per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited**

No	Uraian	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Tagihan TP/TGR	0,00	0,00	0,00
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

Piutang Tagihan
TP/TGR
Rp0,00

C.1.3.1. Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per Tahun 2025 AUDITED tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR Tahun 2024 Audited. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR yang disajikan seluruhnya merupakan Piutang Tagihan TGR dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.22 Saldo Tagihan TGR
per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited**

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
-	-	0,00	0,00	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

Rincian Tagihan TGR per Tahun 2025 AUDITED dapat dilihat pada **Lampiran C.22**.

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih
Rp0,00*

C.1.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp(373.750,00). Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per Tahun 2025 AUDITED mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per Tahun 2024 Audited. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.23. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - TP/TGR
per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited**

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
10	2024	0,00	(373.750,00)	373.750,00
-	-	0,00	0,00	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

*Piutang Jangka
Panjang Lainnya
Rp0,00*

C.1.3.3. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang

jangka panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per Tahun 2025 AUDITED mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per Tahun 2024 Audited.

C.1.3.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per Tahun 2025 AUDITED mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per Tahun 2024 Audited.

C.1.4. ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp148.412.574,00 dan Rp168.047.701,00. Saldo Aset Lainnya per Tahun 2025 AUDITED mengalami penurunan sebesar Rp(10.054.231,00) atau (5,98)% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per Tahun 2024 Audited. Rincian saldo Aset Lainnya per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.24. Rincian Saldo Aset Lainnya
Per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited**

No	Uraian	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	6.115.000,00	6.115.000,00	0,00
2	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00
3	Aset Lain-lain	4.108.179.981,00	4.108.179.981,00	(20.429.000,00)

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Lainnya
Rp0,00

Aset Lainnya
Rp157.993.470,00

4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi	(3.965.882.407,00)	(3.966.676.280,00)	(10.374.769,00)
Jumlah		148.412.574,00	168.047.701,00	(10.054.231,00)

Aset Tak Berwujud
Rp6.115.000,00

C.1.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp6.115.000,00 dan Rp6.115.000,00. Saldo Aset Tak Berwujud per Tahun 2025 AUDITED tidak mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per Tahun 2024 Audited. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.25. Rincian Saldo Aset Tak Berwujud
per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited**

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo ATB Tahun 2024 Audited	6.115.000,00
1	Saldo Awal	0,00
B	Mutasi Tambah	0,00
2	Pembelian	0,00
3	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0,00
4	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0,00
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0,00
6	Perolehan Lainnya	0,00
C	Mutasi Kurang	0,00
7	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0,00
8	Transfer Keluar	0,00
D	Saldo ATB Tahun 2025 AUDITED	6.115.000,00

Rincian saldo Aset Tak Berwujud disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.26 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset

No	Uraian	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Hak Cipta	0,00	0,00	0,00
2	Paten	0,00	0,00	0,00
3	Software	6.115.000,00	6.115.000,00	0,00
4	Lisensi	0,00	0,00	0,00
5	Hasil Kajian/Penelitian	0,00	0,00	0,00
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		6.115.000,00	6.115.000,00	0,00

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran C.26**.

*Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp0,00*

C.1.4.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per Tahun 2025 AUDITED tidak mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per Tahun 2024 Audited. Rincian mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya per Tahun 2025 AUDITED disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.27. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited

No	Keterangan	Jumlah Paket Pekerjaan	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	-	-	0,00	0,00	0,00

2	-	-	0,00	0,00	0,00
3	-	-	0,00	0,00	0,00
Jumlah		-	0,00	0,00	0,00

Aset Lain-Lain
Rp4.108.179.981,00

C.1.4.3. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp4.108.179.981,00 dan Rp4.108.179.981,00. Saldo Aset Lain-Lain per Tahun 2025 AUDITED mengalami penurunan sebesar Rp(20.429.000,00) atau (0,49)% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per Tahun 2024 Audited. Rincian Aset Lain-Lain per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.28. Saldo Aset Lain-Lain per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited

No.	Klasifikasi		Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang dihentikan Penggunaannya	Tanah	0,00	0,00	0,00
		Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Jalan Irigasi Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Aset Tetap Lainnya	4.102.621.408,00	4.123.050.408,00	(20.429.000,00)
2	ATB yang Dihentikan Penggunaannya	Aset Tak Berwujud	5.558.573,00	5.558.573,00	0,00
3	Belanja 526 Belum Didukung Bukti Pertanggungjawaban	Kegiatan ekstensifikasi lahan Tahun xxxx di Kabupaten xxx Provinsi xxx	0,00	0,00	0,00
Total			4.108.179.981,00	4.128.608.981,00	(20.429.000,00)

Akumulasi Penyusutan
Aset Lain-Lain dan
Amortisasi ATB
Rp(3.956.301.511,00)

C.1.4.4. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp(3.965.882.407,00) dan Rp(3.966.676.280,00). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per Tahun 2025 AUDITED mengalami penurunan sebesar Rp10.374.769,00 atau (0,26)% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per Tahun 2024 Audited. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.29. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

No.	Uraian		Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	ATB	Hak Cipta	0,00	0,00	0,00
		Paten	0,00	0,00	0,00
		Software	(6.115.000,00)	(6.115.000,00)	0,00
		Lisensi	0,00	0,00	0,00
		Hasil Kajian/ Penelitian	0,00	0,00	0,00
		ATB Lainnya	(5.558.573,00)	(5.558.573,00)	0,00
	Jumlah		(11.673.573,00)	(11.673.573,00)	0,00
2		Tanah	0,00	0,00	0,00

		Peralatan & Mesin	0,00	0,00	0,00
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
	Aset Lain-Lain	Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Aset Tetap Lainnya	(3.954.208.834,00)	(3.955.002.707,00)	(10.054.231,00)
		Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		(3.954.208.834,00)	(3.955.002.707,00)	(10.054.231,00)
	Total		(3.965.882.407,00)	(3.966.676.280,00)	(10.054.231,00)

Kewajiban
Rp10.742.867,00

C.2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp10.742.867,00 dan Rp28.390.306,00. Saldo Kewajiban per Tahun 2025 AUDITED mengalami penurunan sebesar Rp(17.647.439,00) atau (62,16)% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per Tahun 2024 Audited.

Saldo Kewajiban per Tahun 2025 AUDITED yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Kewajiban Jangka Pendek
Rp10.742.867,00

C.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp10.742.867,00 dan Rp28.390.306,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per Tahun 2025 AUDITED mengalami penurunan sebesar Rp(17.647.439,00) atau (62,16)% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per Tahun 2024 Audited. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.30. Saldo Kewajiban Jangka Pendek
per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited**

No	Uraian	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	10.742.867,00	28.390.306,00	(17.647.439,00)
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00
3	Uang Muka Dari KPPN	0,00	0,00	0,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00
5	Utang Yang Belum Ditagihkan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		10.742.867,00	28.390.306,00	(17.647.439,00)

Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp10.742.867,00

C.2.1.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp10.742.867,00 dan Rp28.390.306,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per Tahun 2025 AUDITED mengalami penurunan sebesar Rp(17.647.439,00) atau (62,16)% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per per Tahun 2024 Audited. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.31. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga
per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited**

No	Uraian		Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0,00	0,00	0,00

		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		0,00	0,00	0,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	10.742.867,00	28.390.306,00	(17.647.439,00)
		Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		10.742.867,00	28.390.306,00	(17.647.439,00)
3	Utang Belanja Modal	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		0,00	0,00	0,00
4	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		0,00	0,00	0,00
Total			10.742.867,00	28.390.306,00	(17.647.439,00)

Utang kepada pihak ketiga senilai Rp10.742.867,00 merupakan tagihan listrik, air dan telepon bulan Desember 2025 yang dibayarkan pada bulan Januari 2026.

C.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per Tahun 2025 AUDITED tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per Tahun 2024 Audited. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited disajikan pada tabel berikut.

Pendapatan Diterima
Dimuka
Rp0,00

**Tabel C.32. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka
per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited**

No	Jenis PNBP	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

Uang Muka Dari KPPN
Rp0,00

C.2.1.3. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Uang Muka dari KPPN per Tahun 2025 AUDITED mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per Tahun 2024 Audited.

Utang Jangka Pendek
Lainnya
Rp0,00

C.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per Tahun 2025 AUDITED tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per Tahun 2024 Audited.

Ekuitas

Rp166.648.026.382,00

C.3. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp166.637.283.544,00 dan Rp167.203.317.616,00. Saldo Ekuitas per Tahun 2025 AUDITED mengalami kenaikan sebesar Rp(566.034.072,00) atau 0,07% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per Tahun 2024 Audited.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional
Rp(10.685.500.648,00)

D.1. KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktifitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran. Rincian Kegiatan Operasional per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.1. Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian
per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited**

Uraian	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)
Pendapatan Operasional	311.069.544,00	152.811.842,00
Beban Operasional	10.996.570.163,00	11.096.568.634,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(10.685.500.619,00)	(10.943.756.792,00)

Pendapatan Operasional
Rp311.069.544,00

D.1.1. PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp311.069.544,00 dan Rp152.811.842,00. Nilai Pendapatan Operasional per Tahun 2025 AUDITED mengalami kenaikan sebesar Rp158.257.702,00, atau 103,56% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional per Tahun 2024 Audited.

Pendapatan Badan Layanan Umum
Rp0,00

D.1.1.1. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) adalah penerimaan yang diperoleh dari aktivitas operasional BLU dalam menyediakan layanan publik, yang dapat berasal dari pembayaran oleh pengguna layanan, hibah, atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan BLU per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan BLU per Tahun 2025 AUDITED tidak mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan BLU per Tahun 2024 Audited. Rincian nilai Pendapatan BLU Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.1. Pendapatan BLU Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited

Uraian	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLU Lainnya	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Perbandingan realisasi Pendapatan BLU di LRA dengan nilai Pendapatan BLU di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.2. Perbandingan Pendapatan BLU Per Tahun 2025 AUDITED di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLU Lainnya	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

D.1.1.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil

Pendapatan
Penerimaan Negara
Bukan Pajak Lainnya
Rp311.069.544,00

pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBPN Lainnya per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp311.069.544,00 dan Rp152.811.842,00. Nilai Pendapatan PNBPN Lainnya per Tahun 2025 AUDITED mengalami kenaikan sebesar Rp158.257.702,00, atau 103,56% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBPN Lainnya Tahun 2024 Audited.

Realisasi Pendapatan PNBPN Lainnya per Tahun 2025 AUDITED di LRA disajikan sebesar Rp388.429.713,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBPN Lainnya Tahun 2025 di LO disajikan sebesar Rp311.069.544,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp77.360.169,00. Selisih tersebut merupakan pengembalian belanja pegawai berupa tunjangan fungsional eks.peneliti (10 orang) senilai Rp74.750.000,00 dan tunjangan umum petubel atas nama drh. Firda Farida Rahmah senilai Rp.925.000,00, pendapatan BMN berupa lelang Rp1.500.000,00 serta pengembalian tunjangan umum atas nama Fawwa Rahly, M.Si senilai Rp185.000,00 serta pengembalian pembulatan gaji senilai Rp169,00 dikurangi dengan sewa rumah dinas bulan Juli senilai Rp0,00 yang sudah masuk ke nilai LO.

Beban Operasional
Rp10.996.570.192,00

D.1.2. BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp10.996.570.163,00 dan Rp11.096.568.634,00. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(787.855.373,00) atau (7,10)% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2024.

Beban Pegawai
Rp4.960.084.395,00

D.1.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional

dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp4.960.084.366,00 dan Rp5.122.604.379,00. Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(192.493.984,00) atau (3,74)% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2025. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1. Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	4.789.470.955,00	5.122.604.379,00	(333.133.424,00)
Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0,00	0,00	0,00
Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0,00	0,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	126.669.440,00	0,00	126.669.440,00
Beban Lembur	43.944.000,00	29.974.000,00	13.970.000,00
Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.960.084.366,00	5.152.578.379,00	(192.493.984,00)

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	4.789.470.955,00	4.789.470.955,00	0,00
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0,00	0,00	0,00
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0,00	0,00	0,00
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	126.669.440,00	126.669.440,00	0,00
Belanja/Beban Lembur	43.944.000,00	43.944.000,00	0,00
Belanja/Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.960.084.366,00	4.960.084.366,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO.

Beban Persediaan
Rp851.565.733,00

D.1.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp851.565.733,00 dan Rp367.822.940,00. Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp483.742.793,00 atau 131,52%, apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2024. Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.1 Beban Persediaan per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited

Uraian	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	0,00	0,00	0,00
Beban Barang Non Operasional	0,00	0,00	0,00
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0,00	0,00	0,00
Beban Barang Persediaan	851.565.733,00	367.822.940,00	483.742.793,00
Beban Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
Beban BLU			
Beban Barang BLU	0,00	0,00	0,00
Jumlah	851.565.733,00	367.822.940,00	483.742.793,00

*) Nilai Beban Barang termasuk alokasi Beban Barang yang menghasilkan Persediaan BLU

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			

Belanja/Beban Barang Operasional	0,00	0,00	0,00
Belanja/Beban Barang Non Operasional	0,00	0,00	0,00
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0,00	0,00	0,00
Belanja/Beban Barang Persediaan	878.491.063,00	851.565.733,00	26.925.330,00
Belanja/Beban Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU	0,00	0,00	0,00
Jumlah	878.491.063,00	851.565.733,00	26.925.330,00

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp26.925.330,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	
Saldo awal	
Tercatat sebagai Persediaan Dalam Proses	
Transfer Keluar	
Transfer Masuk	
Koreksi Nilai Persediaan	
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	
Beban Kerugian Pelepasan Aset	
Beban Persediaan Rusak/Usang	
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	
Jumlah	

Terdapat selisih senilai Rp26.925.330,00 yang merupakan beban persediaan bahan untuk pemeliharaan senilai Rp14.192.000,00 dan saldo persediaan barang konsumsi Tahun Anggaran 2025 senilai Rp12.733.330,00.

D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau

Beban Barang dan
Jasa
Rp2.283.419.177,00

jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp2.283.419.177,00 dan Rp2.082.248.359,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp201.170.818,00 atau 9,66% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	931.230.170,00	643.854.470,00	287.375.700,00
Beban Barang Non Operasional	1.020.981.200,00	1.163.161.101,00	(142.179.901,00)
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0,00	0,00	0,00
Beban Barang Persediaan	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa			
Beban Jasa	331.207.807,00	275.232.788,00	55.975.019,00
Beban BLU			
Beban Barang BLU	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.283.419.177,00	2.082.248.359,00	201.170.818,00

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	931.230.170,00	931.230.170,00	0,00
Belanja/Beban Barang Non Operasional	1.020.981.200,00	1.020.981.200,00	0,00
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0,00	0,00	0,00
Belanja/Beban Barang Persediaan	0,00	0,00	0,00
Belanja/Beban Jasa			
Belanja/Beban Jasa	348.855.246,00	331.207.807,00	17.647.439,00

Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.301.066.616,00	2.283.419.177,00	17.647.439,00

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp17.647.439,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	
Pencatatan Hibah	
Tercatat sebagai Beban Banpem	
Penurunan Beban Pegawai Dibayar Dimuka	
Penurunan Piutang	
Tercatat sebagai KDP	
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	
Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	
Koreksi Pencatatan Beban	
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	
Jumlah	

Terdapat selisih beban barang dan jasa senilai Rp17.647.439,00 yang merupakan utang pihak ketiga TA. 2024 berupa LDJ Listrik, Air dan Telepon yang menjadi beban di TA. 2025 senilai Rp28.390.306,00 dikurangi dengan utang pihak ketiga TA. 2025 yang dibayarkan pada TA. 2026 sebesar Rp10.742.867,00 berupa LDJ Listrik, Air dan Telepon, sehingga terdapat selisih pembebanan keduanya sebesar Rp17.647.439,00.

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau asset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp698.824.723,00 dan Rp796.801.539,00. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar

*Beban Pemeliharaan
Rp698.824.723,00*

Rp(97.976.816,00) atau (12,30)% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp684.632.723,00, nilai Beban Pemeliharaan di LO lebih besar senilai Rp14.192.000,00. Selisih tersebut adalah:

Tabel D.6 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	274.423.250,00	274.423.250,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	410.209.473,00	410.209.473,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang	0,00	14.192.000,00	14.192.000,00
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Pemeliharaan BLU	0,00	0,00	0,00
Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel			
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	684.632.723,00	698.824.723,00	14.192.000,00

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	0,00
Tercatat sebagai Beban Persediaan konsumsi	0,00
Tercatat sebagai Persediaan/Bahan untuk Pemeliharaan	14.192.000,00
Tercatat sebagai Persediaan/Suku Cadang	0,00
Tercatat sebagai KDP	0,00
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0,00
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0,00
Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0,00
Koreksi Pencatatan Beban	0,00
Jumlah	14.192.000,00

D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp650.137.794,00

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp650.137.794,00 dan Rp1.226.412.982,00. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(576.275.188,00) atau (46,99)% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp650.137.794,00, telah sesuai dengan nilai Beban Perjalanan Dinas di LO. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel D.7 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	650.137.794,00	650.137.794,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00		
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	650.137.794,00	650.137.794,00	0,00

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	
Penurunan Beban Barang yang Dibayar Dimuka	
Penurunan Piutang	
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	
Kenaikan Beban Barang Non Operasional Lainnya	
Jumlah	

Beban Barang untuk
Diserahkan Kepada
Masyarakat
Rp187.075.000,00

D.1.2.6. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp187.075.000,00 dan Rp51.432.500,00. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp135.642.500,00 atau 263,73% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.1 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	187.075.000,00	51.432.500,00	135.642.500,00
Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	0,00	0,00
Jumlah	187.075.000,00	51.432.500,00	135.642.500,00

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0,00	187.075.000,00	187.075.000,00
Belanja/Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0,00	0,00	0,00
Belanja/Beban Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	187.075.000,00	187.075.000,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1.365.837.120,00

D.1.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp1.365.837.120,00 dan Rp1.418.898.185,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(740.917.996,00) atau (52,22)% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.9.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian		Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	198.582.444,00	437.326.645,00	(238.744.201,00)
		Gedung dan Bangunan	464.510.542,00	949.103.921,00	(484.593.379,00)
		Jalan Irigasi dan Jaringan	4.832.972,00	9.665.944,00	(4.832.972,00)
		Aset Tetap Lainnya	10.054.231,00	22.801.675,00	(12.747.444,00)
	Jumlah		1.365.837.120,00	1.418.898.185,00	(740.917.996,00)
2	Properti Investasi	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00

	Jumlah		0,00		0,00
3	ATB	Hak Cipta	0,00	0,00	0,00
		Paten	0,00	0,00	0,00
		Software	0,00	0,00	0,00
		Lisensi	0,00	0,00	0,00
		Hasil Kajian/Penelitian	0,00	0,00	0,00
		ATB Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		0,00	0,00	0,00
4	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin	0,00	0,00	0,00
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		0,00	0,00	0,00
Total			1.365.837.120,00	1.418.898.185,00	(740.917.996,00)

Beban Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih
Rp(373.750,00)

D.1.2.8. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp(373.750,00) dan Rp373.750,00. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(747.500,00) atau (200)% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.10.1 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian		Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak	(373.750,00)	373.750,00	(747.500,00)
		Bagian Lancar TP/TGR	0,00	0,00	0,00
		Piutang dari Kegiatan BLU	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		(373.750,00)	373.750,00	(747.500,00)
2	Piutang Jangka Panjang	Tagihan TP/TGR	0,00	0,00	0,00
		Piutang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	0,00	0,00	0,00
	Total		(373.750,00)	373.750,00	(747.500,00)

Surplus/ Defisit Dari
Kegiatan Operasional
Rp(10.685.500.648,00)

D.1.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2025 Kementerian Pertanian mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp(10.685.500.619,00). Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp946.113.075,00 atau (8,65)% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp(10.943.756.792,00).

Kegiatan Non
Operasional
Rp998.357.669,00

D.1.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.2 Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian
Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	1.500.000,00	(199.000.000,00)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	996.857.669,00	219.537.559,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	996.857.669,0	219.537.559,00

Surplus/ Defisit
Pelepasan Aset Non
Lancar
Rp1.500.000,00

Pendapatan Pelepasan
Aset Non Lancar
Rp1.500.000,00

Beban Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp0,00

Surplus/ Defisit Dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp996.857.669,00

D.1.5. SURPLUS/ DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp1.500.000,00 dan Rp(199.000.000,00). Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp200.500.000,00 atau (100,75)% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

D.1.5.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp1.500.000,00 dan Rp23.000.000,00. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(21.500.000,00) atau (93,48)% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

Tabel D.10 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset NonLancar Tahun 2025

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Jumlah	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

D.1.5.2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp222.000.000,00. Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(222.000.000,00) atau (100)% apabila dibandingkan dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

D.1.6. SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp996.857.669,00 dan Rp219.537.559,00. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp777.320.110,00 atau 354,07% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp1.006.707.669,00

D.1.6.1. Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp1.006.707.669,00 dan Rp228.080.059,00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp778.627.610,00 atau 341,38% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.13.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian			Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	0,00	150.000,00	0,00
			Terhadap Bendahara	0,00	0,00	0,00
			Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	185.169,00	74.930.059,00	(74.744.890,00)
			Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
			Belanja Modal	0,00	0,00	0,00

			Belanja Bantuan Sosial (tahun lalu ada bansos?)	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya	998.022.500,00	153.000.000,00	845.002.500,00
4	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Penyesuaian Nilai Persediaan	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
5	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	0,00	0,00	0,00
				1.006.707.669,00	228.080.059,00	778.627.610,00

Pendapatan perolehan aset lainnya (491429) senilai Rp998.022.500,00 merupakan hewan/ tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat berupa benih padi dan jagung.

Pendapatan penyesuaian nilai persediaan (491511) senilai Rp8.500.000,00 merupakan koreksi kuantitas atas benih padi.

*Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp9.850.000,00*

D.1.6.2. Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp9.850.000,00 dan Rp8.542.000,00. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.307.500,00 atau 15,31% apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.14.1 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Tahun 2025 dan 2024**

No.	Uraian			Tahun 2025 AUDITED (Rp)	Tahun 2024 Audited (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
2	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang	1.350.000,00	8.542.500,00	(7.192.500,00)
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	0,00	0,00	0,00
				9.850.000,00	8.542.500,00	1.307.500,00

Surplus/ Defisit Dari
Kegiatan non
Operasional
Rp998.357.669,00

D.1.7. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Kementerian Pertanian mengalami surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp996.857.669,0. Nilai surplus tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp977.820.110,00 atau 4.761,13% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp20.537.559,00.

Pos Luar Biasa

D.1.8. POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

Pendapatan Luar Biasa
Rp0,00

D.1.8.1. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Luar Biasa

Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2024.

*Beban Luar Biasa
Rp0,00*

D.1.8.2. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa per Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2024.

*Surplus/Defisit - LO
Rp(9.687.142.979,00)*

D.1.9. SURPLUS/ DEFISIT – LO

Pada Tahun 2025, Kementerian Pertanian mengalami Defisit LO sebesar Rp(9.687.142.950,00). Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.923.933.185,00 atau (17,61)% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar Rp(10.923.219.233,00).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal
Rp167.203.317.616,00

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp167.203.317.616,00 dan Rp168.428.601.500,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED mengalami penurunan sebesar Rp(1.225.283.884,00) atau (0,73)% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024 Audited.

E.2. SURPLUS/ DEFISIT – LO

Surplus/ Defisit - LO
Rp(9.687.142.979,00)

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp(9.687.142.950,00) dan Rp(10.923.219.233,00). Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED mengalami penurunan sebesar Rp1.923.933.185,00 atau (17,61)% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024 Audited.

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

E.3.1. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan/Kesalahan
Mendasar

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp65.200.000,00

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp65.200.000,00 dan Rp98.147.041,00. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED mengalami

penurunan sebesar Rp(163.347.041,00) atau (166,43)% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024 Audited.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp65.200.000,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.1.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Barang Konsumsi	0,00
2	Suku Cadang	0,00
3	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00
4	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00
6	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00
7	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00
8	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0,00
9	Bahan Baku	0,00
10	Persediaan Lainnya	0,00
11	Transfer Keluar	0,00
12	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0,00
13	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00
14	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0,00
15	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0,00
16	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00
17	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00
B	Koreksi Kurang	0,00
1	Barang Konsumsi	0,00
2	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	65.200.000,00

3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00
4	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0,00
5	Bahan Baku	0,00
6	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0,00
7	Persediaan Lainnya	0,00
8	Beban Persediaan konsumsi	88.940.320,00
9	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00
10	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	8.500.000,00

Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp0,00

E.3.2. KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi atas untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024 Audited.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.2.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Barang Konsumsi	0,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0,00
3	Suku Cadang	0,00
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00

6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00
8	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00
9	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00
10	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0,00
11	Bahan Baku	0,00
12	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0,00
13	Persediaan Lainnya	0,00
14	Persediaan yang Belum Diregister	0,00
15	Tanah	0,00
16	Peralatan dan Mesin	0,00
17	Gedung dan Bangunan	0,00
18	Jalan dan Jembatan	0,00
19	Irigasi	0,00
20	Jaringan	0,00
21	Aset Tetap Renovasi	0,00
22	Konstruksi Dalam pengerjaan	0,00
23	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00
24	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00
25	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00
B	Koreksi Kurang	0,00
1	Barang Konsumsi	0,00
3	Pita Cukai, Materai dan Leges	0,00
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00
7	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00
8	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00
9	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00
10	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00
11	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0,00
12	Bahan Baku	0,00
13	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0,00

14	Persediaan Lainnya	0,00
15	Tanah	0,00
16	Peralatan dan Mesin	0,00
17	Gedung dan Bangunan	0,00
18	Jaringan	0,00
19	Aset Tetap Renovasi	0,00
20	Konstruksi Dalam pengerjaan	0,00
21	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00
22	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00
23	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0,00
24	Koreksi Nilai Persediaan	0,00

Koreksi Nilai Aset Non
Revaluasi
Rp0,00

E.3.3. KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp98.147.041,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED mengalami penurunan sebesar Rp(98.147.041,00) atau (100)% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024 Audited.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.3.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Kas Lainnya di BLU	0,00
2	Tanah	0,00
3	Peralatan dan Mesin	0,00
4	Gedung dan Bangunan	0,00
5	Jalan dan Jembatan	0,00
6	Irigasi	0,00

7	Jaringan	0,00
8	Aset Tetap Renovasi	0,00
9	Aset Tetap Lainnya	0,00
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	0,00
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0,00
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0,00
15	Aset Tetap yang Belum Diregister	0,00
16	Software	0,00
17	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0,00
18	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0,00
19	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0,00
20	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0,00
21	Akumulasi Amortisasi Software	0,00
22	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0,00
23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0,00
24	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0,00
25	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00
26	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0,00
27	Belanja Penambahan Nilai Gedung Bangunan	0,00
28	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0,00
B	Koreksi Kurang	0,00
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin	0,00
3	Gedung dan Bangunan	0,00
4	Jalan dan Jembatan	0,00
5	Irigasi	0,00
6	Jaringan	0,00
7	Aset Tetap Renovasi	0,00
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00
12	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0,00
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0,00
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0,00
15	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00

16	Software	0,00
17	Lisensi	0,00
18	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0,00
19	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0,00
20	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0,00
21	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0,00
22	Akumulasi Amortisasi Software	0,00
24	Belanja	0,00
25	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00
26	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0,00
27	Beban Persediaan Rusak/Usang	0,00

Koreksi Lain-Lain
Rp0,00

E.3.4. KOREKSI LAIN-LAIN

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024 Audited.

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel E.3.4.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain
Tahun 2025**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0,00
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0,00
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00
4	Piutang Lainnya	0,00
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0,00

7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0,00
8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00
9	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0,00
10	Piutang Jangka Panjang lainnya	0,00
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0,00
12	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0,00
13	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0,00
14	Koreksi Lainnya	0,00
15	Beban Honor Output Kegiatan	0,00
16	Beban Sewa	0,00
17	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00
18	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00
19	Beban Persediaan Lainnya	0,00
20	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0,00
21	Beban Persediaan Rusak/Usang	0,00
B	Koreksi Kurang	0,00
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0,00
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0,00
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00
4	Piutang Lainnya	0,00
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0,00
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0,00
8	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0,00
9	Piutang Jangka Panjang lainnya	0,00
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0,00
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0,00
12	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0,00
13	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	0,00
14	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0,00
15	Koreksi Lainnya	0,00
16	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00

17	Beban Bahan	0,00
18	Beban Jasa Profesi	0,00
19	Beban Persediaan Lainnya	0,00
20	Beban Persediaan Rusak/Usang	0,00

Transaksi Antar Entitas

E.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

Ditagihkan Ke Entitas Lain Rp9.574.738.591,00

E.4.1. DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp9.574.738.591,00 dan Rp9.775.930.209,00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED mengalami penurunan sebesar Rp(201.191.618,00) atau (2,06)% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024 Audited.

Diterima Dari Entitas Lain Rp388.429.713,00

E.4.2. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp388.429.713,00 dan Rp176.141.901,00. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED mengalami kenaikan sebesar Rp212.287.812,00 atau 120,52% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024 Audited.

Transfer Keluar Rp9.574.738.591,00

E.4.3. TRANSFER KELUAR

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp9.574.738.591,00 dan Rp9.775.930.209,00. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED mengalami penurunan sebesar Rp(1.823.431.360,00) atau (33,13)% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024 Audited.

Transfer Masuk
Rp388.429.713,00

E.4.4. TRANSFER MASUK

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp388.429.713,00 dan Rp176.141.901,00. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED mengalami kenaikan sebesar Rp212.287.812,00 atau 120,52% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024 Audited.

Pengesahan Hibah
Langsung
Rp0,00

E.4.5. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024 Audited. Rincian Pengesahan

Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.5.1 Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1	-	-	-	-	0,00
2	-	-	-	-	0,00
	TOTAL	-	-	-	0,00

Pengesahan
Pengembalian Hibah
Langsung
Rp0,00

E.4.6. PENGESAHAN PENGEMBALIAN HIBAH LANGSUNG

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024 Audited. Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.6.1 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1	-	-	-	-	0,00
2	-	-	-	-	0,00
3	-	-	-	-	0,00
	TOTAL	-	-	-	0,00

E.4.7. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG TAYL

Pengesahan Hibah
Langsung TAYL
Rp0,00

Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED tidak mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024 Audited. Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.7.1 Pengesahan Hibah Langsung TAYL Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1	-	-	-	-	0,00
2	-	-	-	-	0,00
	TOTAL	-	-	-	0,00

Kenaikan/ Penurunan
Ekuitas
Rp566.034.101,00

E.5. KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS

Pada Tahun 2025, Kementerian Pertanian mengalami kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp(566.034.072,00). Nilai kenaikan/penurunan tersebut lebih tinggi sebesar Rp1.347.106.714,00 atau (109,94)% apabila dibandingkan dengan kenaikan/penurunan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp(1.225.283.884,00).

Ekuitas Akhir
Rp166.648.026.382,00

E.6. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED dan Tahun 2024 Audited masing-masing disajikan sebesar Rp166.637.283.544,00 dan Rp167.203.317.616,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 AUDITED mengalami penurunan sebesar Rp(566.034.072,00),00 atau 0,07% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024 Audited.

Pembentukan Badan
Perakitan dan
Modernisasi Pertanian

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

**F.1. PEMBENTUKAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN**

Pada Tahun 2025, terjadi perubahan nomenklatur BSIP menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Perubahan tersebut didasari oleh Perpres Nomor 192 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian bertugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.

Meskipun perubahan nomenklatur terjadi di Tahun 2024, namun dokumen penganggaran dan keuangan tetap menggunakan nomenklatur BSIP, begitu juga dengan penyebutan satker di lingkungan BSIP masih menggunakan nomenklatur lama. Penggunaan nomenklatur yang baru berlaku efektif mulai tahun anggaran 2025.

Pengungkapan
Capaian Output Per
Fungsi APBN dan
Prioritas Nasional
2025

**F.2. PENGUNGKAPAN CAPAIAN RINCIAN OUTPUT PER FUNGSI
APBN DAN PRIORITAS NASIONAL 2025**

Nilai pagu anggaran pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh Rp9.782.771.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.574.738.591,00 atau 97,87%, dimana realisasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 24 (dua puluh empat) rincian output (RO) kegiatan. Dari 24 (dua puluh empat) RO yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, sebanyak 15 (lima belas) RO capaian realisasi volumenya sudah 100%. Rinciannya dapat dilihat pada table berikut:

Kode	Kegiatan	Belanja	Keluaran	Keterangan
------	----------	---------	----------	------------

Catatan Atas Laporan Keuangan Periode Tahun 2025 Unaudited

		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Instrumen Pertanian Terstandar yang di Uji								
	Rincian Output 1	76.195.000	0	0	51	0	Produk	0	Kegiatan masih di blokir
	Rincian Output 2	76.195.000	0	0	51	0	Produk	0	Kegiatan masih di blokir
	Rincian Output 3	76.195.000	0	0	51	0	Produk	0	Kegiatan masih di blokir
	Rincian Output 4	76.195.000	0	0	51	0	Produk	1	Kegiatan masih di blokir
	Rincian Output 5	76.195.000	0	0	51	0	Produk	2	Kegiatan masih di blokir
	Rincian Output 6	76.195.000	0	0	51	0	Produk	4	Kegiatan masih di blokir
	Rincian Output 7	76.195.000	0	0	51	0	Produk	6	Kegiatan masih di blokir
	Rincian Output 8	76.195.000	0	0	51	0	Produk	8	Kegiatan masih di blokir
	Kegiatan Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan								
	Rincian Output 9	60.000.000	0	0	150	0	Orang	3	Kegiatan Baru terbuka blokir di akhir september
	Rincian Output 10	60.000.000	14.400.000	24	150	0	Orang	27	
	Rincian Output 11	60.000.000	44.880.000	74,8	150	0	Orang	77	
	Rincian Output 12	60.000.000	54.872.450	91,45	150	150	Orang	100	
	Kegiatan Laporan Hasil Uji Instrumen Pertanian								
	Rincian Output 9	60.000.000	0	0	48	0	Produk	10	Kegiatan Baru terbuka blokir di akhir september
	Rincian Output 10	60.000.000	0	0	48	0	Produk	12	
	Rincian Output 11	60.000.000	60.000.000	100	48	48	Produk	100	
	Rincian Output 12	60.000.000	60.000.000	100	48	48	Produk	100	
	Kegiatan Sarana Laboratorium Pertanian Modern								

Catatan Atas Laporan Keuangan Periode Tahun 2025 Unaudited

		Rincian Output 9	101.185.000	0	0	1	0	Unit	2	Kegiatan Baru terbuka blokir di akhir september
		Rincian Output 10	101.185.000	93.000.000	91,91	1	0	Unit	94	
		Rincian Output 11	101.185.000	93.000.000	91,91	1	0	Unit	97	
		Rincian Output 12	101.185.000	101.011.000	99,83	1	1	Unit	100	
		Kegiatan Layanan BMN								
		Rincian Output 1	10.000.000	0	0	1	0	Layanan	8,33	
		Rincian Output 2	10.000.000	0	0	1	0	Layanan	16,66	
		Rincian Output 3	10.000.000	0	0	1	0	Layanan	24,99	
		Rincian Output 4	10.000.000	0	0	1	0	Layanan	33,32	
		Rincian Output 5	10.000.000	0	0	1	0	Layanan	41,65	
		Rincian Output 6	10.000.000	0	0	1	0	Layanan	49,98	
		Rincian Output 7	10.000.000	1.901.800	19,02	1	0	Layanan	58,31	
		Rincian Output 8	10.000.000	1.901.800	19,02	1	0	Layanan	66,64	
		Rincian Output 9	10.000.000	1.901.800	19,02	1	0	Layanan	74,97	
		Rincian Output 10	10.000.000	3.995.800	39,96	1	0	Layanan	83,3	
		Rincian Output 11	10.000.000	9.845.800	98,46	1	0	Layanan	99,3	
		Rincian Output 12	10.000.000	9.980.800	99,81	1	1	Layanan	100	
		Kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi								
		Rincian Output 9	30.000.000	0	0	1	0	Layanan	2	Blokir baru kebuka akhir bulan september
		Rincian Output 10	30.000.000	4.900.000	16,33	1	0	Layanan	27	
		Rincian Output 11	30.000.000	4.900.000	16,33	1	0	Layanan	52	
		Rincian Output 12	30.000.000	12.860.000	42,87	1	1	Layanan	100	
		Kegiatan Layanan Umum								
		Rincian Output 1	195.000.000	0	0	1	0	Layanan	8,33	
		Rincian Output 2	195.000.000	0	0	1	0	Layanan	16,66	
		Rincian Output 3	195.000.000	0	0	1	0	Layanan	24,99	
		Rincian Output 4	195.000.000	0	0	1	0	Layanan	33,32	
		Rincian Output 5	195.000.000	0	0	1	0	Layanan	41,65	
		Rincian Output 6	195.000.000	6.196.700	3,18	1	0	Layanan	49,98	
		Rincian Output 7	195.000.000	18.171.250	9,32	1	0	Layanan	58,31	
		Rincian Output 8	195.000.000	49.222.250	25,24	1	0	Layanan	66,64	

Catatan Atas Laporan Keuangan Periode Tahun 2025 Unaudited

		Rincian Output 9	130.000.000	59.187.100	45,53	1	0	Layanan	74,97	
		Rincian Output 10	130.000.000	93.347.450	71,81	1	0	Layanan	83,3	
		Rincian Output 11	130.000.000	106.187.450	81,68	1	0	Layanan	91,63	
		Rincian Output 12	130.000.000	126.678.850	97,45	1	1	Layanan	100	
		Kegiatan Layanan Perkantoran								
		Rincian Output 1	7.066.120.000	340.449.711	4,82	1	0	Layanan	8,33	
		Rincian Output 2	7.066.120.000	753.269.432	10,66	1	0	Layanan	16,66	
		Rincian Output 3	7.066.120.000	1.578.902.863	22,34	1	0	Layanan	24,99	
		Rincian Output 4	7.066.120.000	1.738.532.068	24,6	1	0	Layanan	33,32	
		Rincian Output 5	7.066.120.000	2.501.220.814	35,4	1	0	Layanan	41,65	
		Rincian Output 6	7.066.120.000	3.445.246.922	48,76	1	0	Layanan	49,98	
		Rincian Output 7	7.066.120.000	3.931.014.943	55,63	1	0	Layanan	58,31	
		Rincian Output 8	7.066.120.000	4.447.680.448	62,94	1	0	Layanan	66,64	
		Rincian Output 9	6.913.986.000	5.069.236.886	73,32	1	0	Layanan	74,97	
		Rincian Output 10	6.913.986.000	5.559.668.580	80,41	1	0	Layanan	83,3	
		Rincian Output 11	6.913.986.000	6.142.185.194	88,84	1	0	Layanan	91,63	
		Rincian Output 12	6.913.986.000	6.867.228.572	99,32	1	1	Layanan	100	
		Kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi								
		Rincian Output 9	35.000.000	200.000	0,57	1	0	Dokumen	3	Kegiatan Baru terbuka blokir di akhir september
		Rincian Output 10	35.000.000	8.780.000	25,09	1	0	Dokumen	28	
		Rincian Output 11	35.000.000	10.460.000	29,89	1	0	Dokumen	33	
		Rincian Output 12	35.000.000	18.780.000	53,66	1	1	Dokumen	100	
		Kegiatan Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi								
		Rincian Output 1								
		Rincian Output 2								
		Rincian Output 3								
		Rincian Output 4	1.552.600.000	0	0	100	0	Unit	1	Kegiatan masih di blokir
		Rincian Output 5	1.552.600.000	0	0	100	0	Unit	2	Kegiatan masih di blokir
		Rincian Output 6	1.552.600.000	80.285.000	5,17	100	0	Unit	38,07	
		Rincian Output 7	1.552.600.000	189.365.000	12,2	100	0	Unit	58,3	

		Rincian Output 8	1.552.600.000	464.408.000	29,91	100	0	Unit	58,3	
		Rincian Output 9	1.552.600.000	1.158.026.050	74,59	100	0	Unit	88,3	
		Rincian Output 10	1.552.600.000	1.250.786.050	80,56	100	0	Unit	93,3	
		Rincian Output 11	1.552.600.000	1.397.869.050	90,03	100	0	Unit	98,3	
		Rincian Output 12	1.552.600.000	1.538.841.413	99,11	100	100	Unit	100	
		Kegiatan Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian								
		Rincian Output 1								
		Rincian Output 2								
		Rincian Output 3								
		Rincian Output 4	1.650.000.000	0	0	1	0	Kegiatan	1	Kegiatan masih di blokir
		Rincian Output 5	1.650.000.000	73.251.500	4,44	1	0	Kegiatan	11	Kegiatan sudah dilaksanakan dan sebagian anggaran masih di blokir
		Rincian Output 6	1.650.000.000	149.177.500	9,04	1	0	Kegiatan	41,21	
		Rincian Output 7	1.650.000.000	253.358.863	15,36	1	0	Kegiatan	56,59	
		Rincian Output 8	1.650.000.000	336.199.263	20,38	1	0	Kegiatan	56,59	
		Rincian Output 9	840.000.000	398.323.343	47,42	1	0	Kegiatan	87,59	
		Rincian Output 10	890.000.000	486.104.923	54,62	1	0	Kegiatan	92,59	
		Rincian Output 11	890.000.000	653.870.944	73,47	1	0	Kegiatan	97,59	
		Rincian Output 12	890.000.000	785.560.944	88,27	1	1	Kegiatan	100	
		Subtotal	9.782.771.000	9.575.814.029						
		Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll)	-	0						
		Total	9.782.771.000	9.575.814.029						

Prioritas Nasional 02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 1 kegiatan prioritas, yang tersebar di *(diisi jumlah satker pengampu PN terkait)* satuan kerja dengan pagu mencapai Rp.1.552.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.158.026.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga:

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas/ Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi	1.552.600.000	1.538.841.413	99,11	Unit	100	0	100

F.3. CATATAN DALAM MONSAKTI

F.3.1. TO DO LIST

Tidak terdapat to do list pada Aplikasi Monsakti.

F.3.2. REKONSILIASI

Berdasarkan hasil rekonsiliasi SAKTI-SPAN tidak terdapat Transaksi Dengan Konfirmasi Rupiah (TDK RUPIAH), Transaksi Dalam Konfirmasi Chart of Account (TDK CoA) dan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) telah terbit per tanggal 23 Januari 2026.

To Do List

Rekonsiliasi

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : (567392) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
ACEH

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 10:16 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	311,069,544	152,811,842	158,257,702	103.564
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	311,069,544	152,811,842	158,257,702	103.564
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	311,069,544	152,811,842	158,257,702	103.564
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	4,960,084,366	5,152,578,379	(192,494,013)	(3.736)
Beban Persediaan	851,565,733	367,822,940	483,742,793	131.515
Beban Barang dan Jasa	2,283,419,177	2,082,248,359	201,170,818	9.661
Beban Pemeliharaan	698,824,723	796,801,539	(97,976,816)	(12.296)
Beban Perjalanan Dinas	650,137,794	1,226,412,982	(576,275,188)	(46.989)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	187,075,000	51,432,500	135,642,500	263.729

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : (567392) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
ACEH

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 10:16 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,365,837,120	1,418,898,185	(53,061,065)	(3.74)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(373,750)	373,750	(747,500)	(200)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	10,996,570,163	11,096,568,634	(99,998,471)	(0.901)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(10,685,500,619)	(10,943,756,792)	258,256,173	(2.36)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	1,500,000	(199,000,000)	200,500,000	(100.754)
Pendapatan Pelepasan Aset	1,500,000	23,000,000	(21,500,000)	(93.478)
Beban Pelepasan Aset	0	222,000,000	(222,000,000)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	996,857,669	219,537,559	777,320,110	354.072
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,006,707,669	228,080,059	778,627,610	341.383
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	9,850,000	8,542,500	1,307,500	15.306
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	998,357,669	20,537,559	977,820,110	4,761.131
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(9,687,142,950)	(10,923,219,233)	1,236,076,283	(11.316)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(9,687,142,950)	(10,923,219,233)	1,236,076,283	(11.316)

Keterangan :
FINAL

Banda Aceh, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



FIRDAUS
197108052006041002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (567392) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 10:16 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	167,203,317,616	168,428,601,500	(1,225,283,884)	(0.73)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(9,687,142,950)	(10,923,219,233)	1,236,076,283	(11.32)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(65,200,000)	98,147,041	(163,347,041)	(166.43)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(65,200,000)	0	(65,200,000)	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	98,147,041	(98,147,041)	(100)
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	9,186,308,878	9,599,788,308	(413,479,430)	(4.31)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(566,034,072)	(1,225,283,884)	659,249,812	(53.8)
EKUITAS AKHIR	166,637,283,544	167,203,317,616	(566,034,072)	(0.34)

Keterangan :

FINAL

Banda Aceh, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



FIRDAUS

197108052006041002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH 567392

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 10:17 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	325,800,000	388,429,713	62,629,713	119	129,518,000	176,141,901	(46,623,901)	136
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	325,800,000	388,429,713	62,629,713	119	129,518,000	176,141,901	(46,623,901)	136
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	325,800,000	388,429,713	62,629,713	119	129,518,000	176,141,901	(46,623,901)	136
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	9,782,771,000	9,574,738,591	(208,032,409)	98	10,260,265,000	9,775,930,209	484,334,791	95
1. Belanja Pegawai	4,993,436,000	4,960,084,395	(33,351,605)	99	5,205,217,000	5,153,503,379	51,713,621	99
2. Belanja Barang	4,688,835,000	4,514,328,196	(174,506,804)	96	4,898,567,000	4,466,126,830	432,440,170	91
3. Belanja Modal	100,500,000	100,326,000	(174,000)	100	156,481,000	156,300,000	181,000	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH 567392

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 10:17 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	9,782,771,000	9,574,738,591	(208,032,409)	98	10,260,265,000	9,775,930,209	484,334,791	95
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Banda Aceh, 5 Mei 2026
Peranggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

FIRDAUS
- 197108052006041002



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (567392) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 10:17 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	29	75,675,000	(75,674,971)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(373,750)	373,750	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	29	75,301,250	(75,301,221)	(100.00)
Persediaan	922,203,900	165,073,070	757,130,830	458.66
JUMLAH ASET LANCAR	922,203,929	240,374,320	681,829,609	283.65
ASET TETAP				
Tanah	148,263,738,880	148,263,738,880	0	0.00
Peralatan dan Mesin	8,345,588,746	8,245,262,746	100,326,000	1.22
Gedung dan Bangunan	24,222,491,437	24,222,491,437	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	288,381,000	288,381,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	60,750,000	60,750,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(15,603,540,155)	(14,257,338,162)	(1,346,201,993)	9.44
JUMLAH ASET TETAP	165,577,409,908	166,823,285,901	(1,245,875,993)	(0.75)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	6,115,000	6,115,000	0	0.00
Aset Lain-lain	4,108,179,981	4,128,608,981	(20,429,000)	(0.49)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(3,965,882,407)	(3,966,676,280)	793,873	(0.02)
JUMLAH ASET LAINNYA	148,412,574	168,047,701	(19,635,127)	(11.68)
JUMLAH ASET	166,648,026,411	167,231,707,922	(583,681,511)	(0.35)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	10,742,867	28,390,306	(17,647,439)	(62.16)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10,742,867	28,390,306	(17,647,439)	(62.16)
JUMLAH KEWAJIBAN	10,742,867	28,390,306	(17,647,439)	(62.16)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	166,637,283,544	167,203,317,616	(566,034,072)	(0.34)
JUMLAH EKUITAS	166,637,283,544	167,203,317,616	(566,034,072)	(0.34)
JUMLAH EKUITAS	166,637,283,544	167,203,317,616	(566,034,072)	(0.34)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	166,648,026,411	167,231,707,922	(583,681,511)	(0.35)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (567392) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

ACEH

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 10:17 AM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL



Banda Aceh, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

FIRDAUS

197108052006041002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (567392) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 10:18 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	29	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	24,806,400	0
0.0	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	897,397,500	0
0.0	131111	Tanah	148,263,738,880	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	8,345,588,746	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	24,222,491,437	0
0.0	134112	Irigasi	245,981,000	0
0.0	134113	Jaringan	42,400,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	60,750,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	7,917,947,170
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	7,591,165,467
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	72,697,518
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	21,730,000
0.0	162151	Software	6,115,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	4,102,621,408	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	5,558,573	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	3,954,208,834
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	6,115,000
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	5,558,573
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	10,742,867
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	9,574,738,591
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	388,429,713	0
0.0	391111	Ekuitas	0	167,203,317,616
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	65,200,000	0
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	258,823,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,500,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	52,246,544
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	185,169
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	998,022,500
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	8,500,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,338,902,520	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	50,543	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	257,549,362	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	83,728,490	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	274,360,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	26,064,331	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (567392) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 10:18 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	192,202,680	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	501,363,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	90,050,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	87,612,364	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,084	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	6,090,387	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	4,242,605	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	22,532,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	6,190,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	43,944,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	654,619,670	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	81,680,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	194,930,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	223,156,200	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	785,080,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	12,745,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	165,352,744	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	5,832,663	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	7,222,400	0
3.0	522141	Beban Sewa	97,700,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	37,500,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	17,600,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	274,423,250	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	410,209,473	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	646,217,794	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,920,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	407,514,986	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	929,021,063	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	8,605,944	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	1,060,000	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	19,635,127	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	88,940,320	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	14,192,000	0
3.0	593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	187,075,000	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	762,625,413	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	8,500,000	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	373,750
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	1,350,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : (567392) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
ACEH

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 10:18 AM
Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			197,677,872,599	197,677,872,599

Keterangan :

FINAL

Banda Aceh, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (567392) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
ACEH

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 10:19 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	9,574,738,591
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	388,429,713	0
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	258,823,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,500,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	52,246,544
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	75,860,169
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,339,127,320	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	50,910	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	257,563,762	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	83,729,390	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	274,640,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	26,064,331	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	192,202,680	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	501,363,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	90,605,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	87,612,364	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,084	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	6,090,387	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,242,605	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	22,532,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	6,190,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	43,944,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	654,619,670	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	81,680,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	194,930,500	0
3.0	521211	Belanja Bahan	223,156,200	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	785,080,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	12,745,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	115,865,650	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	762,625,413	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	181,691,951	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	6,544,715	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	7,818,580	0
3.0	522141	Belanja Sewa	97,700,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	37,500,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	17,600,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (567392) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 10:19 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	274,423,250	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	410,209,473	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	646,217,794	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,920,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100,326,000	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	224,800
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	338
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	14,400
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	900
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	280,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	555,000
JUMLAH			9,964,243,742	9,964,243,742

Keterangan :

FINAL

Banda Aceh, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



FIRDAUS

197108052006041002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 0600
SATUAN KERJA : 567392
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 10:19 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/26 8:15 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,466,960,000	3,339,150,000	3,339,127,320	224,800	3,338,902,520	99.99	247,480
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	71,000	56,000	50,910	338	50,572	90.31	5,428
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	270,641,000	257,572,000	257,563,762	14,400	257,549,362	99.99	22,638
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	93,275,000	83,737,000	83,729,390	900	83,728,490	99.99	8,510
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	25,200,000	25,200,000	0	25,200,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	276,920,000	274,696,000	274,640,000	280,000	274,360,000	99.88	336,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	39,649,000	26,241,000	26,064,331	0	26,064,331	99.33	176,669
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	203,770,000	192,300,000	192,202,680	0	192,202,680	99.95	97,320
511129	Belanja Uang Makan PNS	624,096,000	525,824,000	501,363,000	0	501,363,000	95.35	24,461,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	94,990,000	90,670,000	90,605,000	555,000	90,050,000	99.32	620,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	5,095,572,000	4,815,446,000	4,790,546,393	1,075,438	4,789,470,955	99.46	25,975,045
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	87,614,000	87,612,364	0	87,612,364	100	1,636
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	9,000	2,084	0	2,084	23.16	6,916
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	6,095,000	6,090,387	0	6,090,387	99.92	4,613
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	9,000	0	0	0	0	9,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	4,253,000	4,242,605	0	4,242,605	99.76	10,395
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	23,816,000	22,532,000	0	22,532,000	94.61	1,284,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	6,196,000	6,190,000	0	6,190,000	99.9	6,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	127,992,000	126,669,440	0	126,669,440	98.97	1,322,560
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	49,998,000	49,998,000	43,944,000	0	43,944,000	87.89	6,054,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	49,998,000	49,998,000	43,944,000	0	43,944,000	87.89	6,054,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	5,145,570,000	4,993,436,000	4,961,159,833	1,075,438	4,960,084,395	99.33	33,351,605
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	709,050,000	658,850,000	654,619,670	0	654,619,670	99.36	4,230,330
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	81,680,000	81,680,000	81,680,000	0	81,680,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	210,000,000	195,000,000	194,930,500	0	194,930,500	99.96	69,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,000,730,000	935,530,000	931,230,170	0	931,230,170	99.54	4,299,830
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	114,418,000	269,497,000	223,156,200	0	223,156,200	82.8	46,340,800

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 0600
SATUAN KERJA : 567392
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 10:19 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/26 8:15 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	72,897,000	797,880,000	785,080,000	0	785,080,000	98.4	12,800,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	12,745,000	12,745,000	0	12,745,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	187,315,000	1,080,122,000	1,020,981,200	0	1,020,981,200	94.52	59,140,800
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	109,000,000	115,900,000	115,865,650	0	115,865,650	99.97	34,350
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	776,543,000	762,625,413	0	762,625,413	98.21	13,917,587
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	109,000,000	892,443,000	878,491,063	0	878,491,063	98.44	13,951,937
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	168,030,000	185,714,000	181,691,951	0	181,691,951	97.83	4,022,049
522112	Belanja Langganan Telepon	7,054,000	7,054,000	6,544,715	0	6,544,715	92.78	509,285
522113	Belanja Langganan Air	18,000,000	12,416,000	7,818,580	0	7,818,580	62.97	4,597,420
522141	Belanja Sewa	0	100,700,000	97,700,000	0	97,700,000	97.02	3,000,000
522151	Belanja Jasa Profesi	6,000,000	54,900,000	37,500,000	0	37,500,000	68.31	17,400,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	17,600,000	17,600,000	0	17,600,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	199,084,000	378,384,000	348,855,246	0	348,855,246	92.2	29,528,754
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	194,920,000	279,836,000	274,423,250	0	274,423,250	98.07	5,412,750
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	401,616,000	410,440,000	410,209,473	0	410,209,473	99.94	230,527
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	596,536,000	690,276,000	684,632,723	0	684,632,723	99.18	5,643,277
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	109,080,000	708,047,000	646,217,794	0	646,217,794	91.27	61,829,206
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	4,033,000	3,920,000	0	3,920,000	97.2	113,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	109,080,000	712,080,000	650,137,794	0	650,137,794	91.3	61,942,206
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,201,745,000	4,688,835,000	4,514,328,196	0	4,514,328,196	96.28	174,506,804
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	100,500,000	100,326,000	0	100,326,000	99.83	174,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	100,500,000	100,326,000	0	100,326,000	99.83	174,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	100,500,000	100,326,000	0	100,326,000	99.83	174,000
	JUMLAH BELANJA	7,347,315,000	9,782,771,000	9,575,814,029	1,075,438	9,574,738,591	97.87	208,032,409

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 018

KEMENTERIAN PERTANIAN

Kode Lap : LRA.P.E1.1

ESELON I

: 09

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Tanggal : 05/05/26 10:19 AM

WILAYAH/PROVINSI

: 0600

NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Halaman : 1

SATUAN KERJA

: 567392

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH

Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	252,000,000	258,823,000	0	258,823,000	102.71
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,500,000	0	1,500,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	22,800,000	0	0	0	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	51,000,000	52,246,544	0	52,246,544	102.44
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	325,800,000	312,569,544	0	312,569,544	95.94
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	75,860,169	0	75,860,169	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	75,860,169	0	75,860,169	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	325,800,000	388,429,713	0	388,429,713	119.22
	JUMLAH PENDAPATAN	325,800,000	388,429,713	0	388,429,713	119.22